

**ANALISIS PENGARUH DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN**



Diajukan oleh

Nuryana Nurul Hasanah

22918021

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

**ANALISIS PENGARUH DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN**

Tesis S-2

Program Magister Ilmu Ekonomi



Diajukan oleh

Nuryana Nurul Hasanah

22918021

PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 21 Oktober 2024

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Jaka Sriyana', is written below the title 'Dosen Pembimbing'.

Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Program Studi Ilmu Ekonomi Program Magister,
Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis
yang disusun oleh :

NURYANA NURUL HASANAH

No. Mhs. : 22918021

Konsentrasi : Ekonomi Kebijakan

Dengan Judul:

**ANALISIS PENGARUH DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN**

Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Prof. Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.

Penguji II



Drs. Akhsyim Afandi, M.A., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Prof. Dr. Agus Widarjono, M.A., Ph.D.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak ada karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak ada karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara jelas disebutkan dalam naskah ini dan tercantum dalam daftar referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 9 Oktober 2024



Nuryana Nurul Hasanah

TESIS

**ANALISIS PENGARUH DANA KEISTIMEWAAN TERHADAP
PENGENTASAN KEMISKINAN**

Diajukan oleh


Nuryana Nurul Hasanah

22918021

telah disetujui oleh :

Yogyakarta, 7/10/2024

Dosen Pembimbing



Prof. Jaka Sriyana., S.E., M.Si., Ph.D

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Waramahtullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan Terhadap Pengentasan Kemiskinan”. Tesis inidisusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi & Keuangan pada Program Studi Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia.

Penulisan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

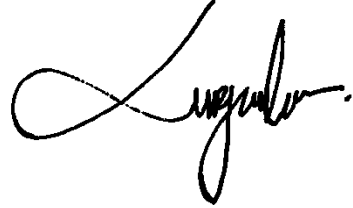
1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Jaka Sriyana., S.E., M.Si., Ph.D selaku pembimbing penulis yang telah memberikan arahan, bimbingan serta motivasi dalam proses penyusunan tesis ini.
3. Kedua orang tua penulis yakni Bapak Saryana dan Ibu Heni Nurhayati yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi dan doa yang tidak pernah putus.
4. Adik penulis yakni Nuryana Adik Khoirul Adha yang selalu memberikan semangat dan dukungan.

5. Alfarina Yoshi Bayu Putri. Terima kasih telah memberikan semangat, dukungan dan motivasi.
6. Pimpinan dan staff Paniradya Kaistimewan khususnya Bidang Perencanaan dan Pengendalian yang selalu memberikan semangat, dukungan dan keperluan data dalam penulisan tesis ini.
7. Teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Ekonomi Angkatan 26 yang selalu memberikan semangat, saling mendukung dan berbagi pengalaman selama masa studi dan penulisan tesis ini
8. Seluruh dosen dan staff Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama masa studi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dalam bentuk apa pun selama penyusunan tesis ini

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak yang berkepentingan serta menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 7 Oktober 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nuryana Nurul Hasanah', with a large loop at the beginning and a horizontal line at the end.

Nuryana Nurul Hasanah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II.....	11
KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Kemiskinan	11
2.2 Dana Keistimewaan	20
2.3 Indeks Pembangunan Manusia.....	29
2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka.....	30
2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto	31
2.6 Penelitian Terdahulu	32
2.7 Kerangka Pemikiran.....	35
2.8 Pengembangan Hipotesis	36
2.9 Pernyataan Hipotesis.....	38

BAB III	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis dan sumber data	40
3.2 Definisi Operasional Variabel	40
3.3 Variabel <i>dependen</i> (terikat)	40
3.4 Variabel <i>independen</i> (bebas).....	41
3.5 Metode Analisis	42
3.6 Pendekatan Model Regresi Data Panel	43
3.6.1 Pendekatan Regresi Data Panel dengan <i>Common Effect Model</i>	43
3.6.2 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model.....	44
3.6.3 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Random Effect Model.....	45
3.7 Pemilihan teknik estimasi regresi Data Panel	46
3.7.1 Uji Chow (Uji F).....	46
3.7.2 Uji Lagrange Multiplier (LM).....	47
3.7.3 Uji Hausman	49
3.8 Uji Statistik	50
3.8.1 Koefisien Determinasi.....	50
3.8.2 Uji Parsial (Uji t).....	50
3.8.3 Uji simultan (Uji F).....	52
BAB IV	54
HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	54
4.1 Hasil Analisis Penelitian	55
4.1.2 Hasil regresi data panel Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model.....	63
4.1.2 Penentuan model regresi data panel yang sesuai	64
4.1.3 Uji statistik dengan <i>Fixed Effect Model</i>	65
4.2 Pembahasan.....	73
4.2.1 Dana Keistimewaan terhadap penurunan Kemiskinan di DIY	73
4.2.2 IPM terhadap penurunan Kemiskinan di DIY	82
4.2.3 TPT terhadap penurunan Kemiskinan di DIY.....	86
4.2.4 Laju Pertumbuhan PDRB terhadap penurunan Kemiskinan di DIY.....	88

BAB V PENUTUP.....	93
5.1 Kesimpulan.....	93
5.2 Implikasi dan Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Keistimewaan DIY	5
Tabel II.2 Kebutuhan kegiatan dalam mengintervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY	13
Tabel II.3 Dasar Hukum Pengelolaan Dana Keistimewaan	21
Tabel II.4 Program, indikator output dan dukungan terhadap indikator outcome Pembangunan Urusan Keistimewaan tahun 2022-2024	25
Tabel II.5 Penelitian Terdahulu	32
Tabel IV. 6 Hasil regresi data Panel Common Effect Model, Fixed Effect Model dan Random Effect Model.....	63
Tabel IV.7 Hasil uji chow	64
Tabel IV.8 Hasil Uji Hausman.....	65
Tabel IV.9 Hasil Estimasi Fixed Effect Model dengan Eviews 12	65
Tabel IV.10 Hasil Estimasi Fixed Effect Model dengan Eviews 12	66
Tabel IV.11 Hasil Estimasi Fixed Effect Model dengan Model Regresi Adaptive	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pagu, Realisasi Keuangan dan Silpa Danais (2013 s.d 2023) (Paniradya Kaistimewan, 2024 diolah).....	7
Gambar II.2 Sebaran Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023 diolah).....	12
Gambar II.3 Kerangka Pemikiran	35

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Aktivitas mendukung penurunan kemiskinan pada Tahun Anggaran 2023.....	108
Lampiran 2 Hibah Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan Tahun Anggaran 2023	112
Lampiran 3 Presentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota, Presentase Capaian Dana Keistimewaan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan PDRB di DIY Tahun 2014 s.d 2023.....	122
Lampiran 4 Hasil Uji Regresi Data Panel	124
Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Logaritma.....	125
Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Adaptive Model	126

BAB I

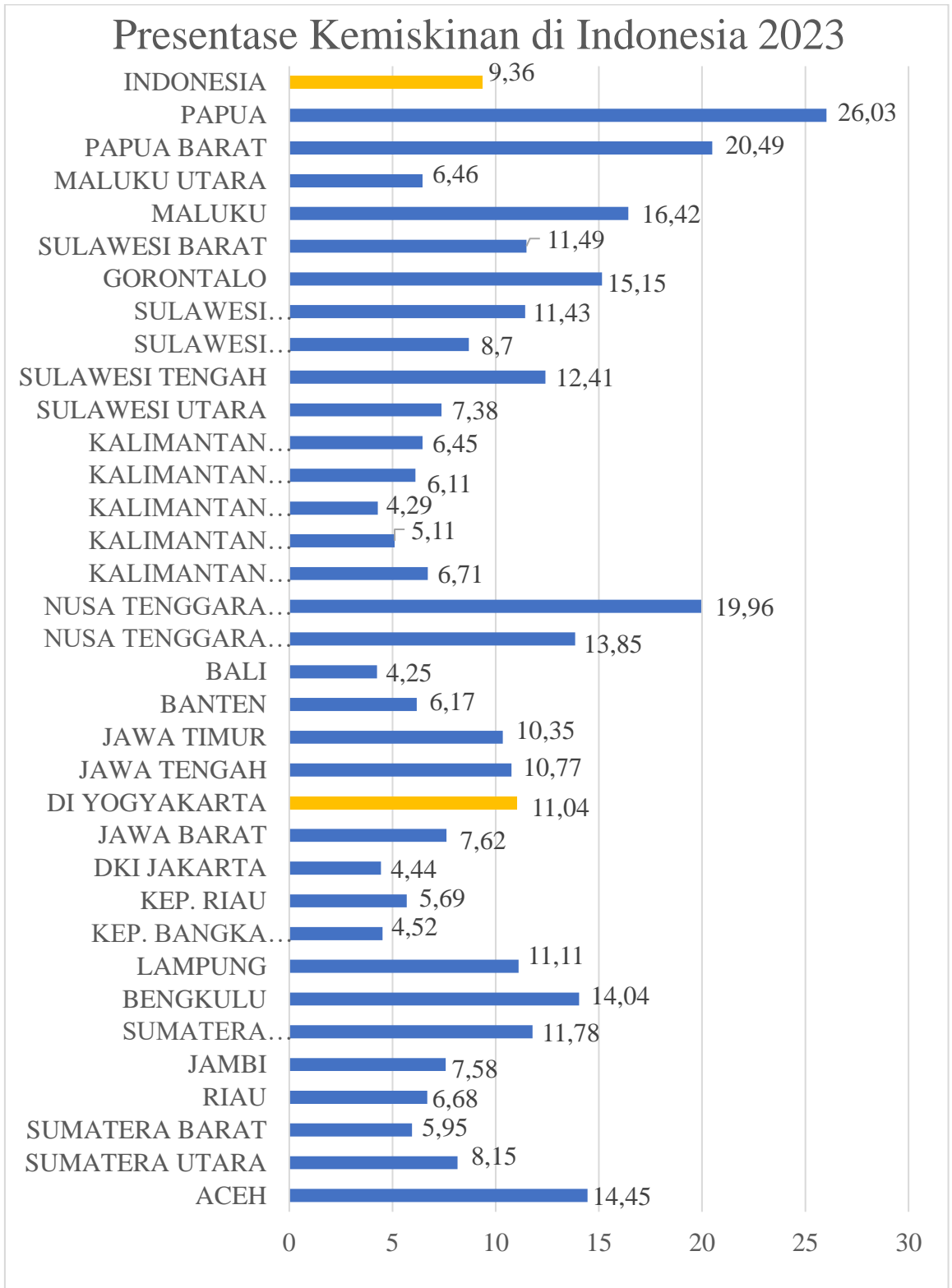
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada September 2015, PBB telah mendeklarasikan upaya mensejahterakan masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang melalui 17 tujuan dan sasaran global tahun 2030, deklarasi ini menciptakan komitmen global dan nasional yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), 17 tujuan dan sasaran global tersebut yaitu : (1) tanpa kemiskinan ; (2) tanpa kelaparan ; (3) kehidupan sehat dan Sejahtera ; (3) kehidupan sehat dan Sejahtera ; (4) pendidikan berkualitas ; (5) kesetaraan gender ; (6) air bersih dan sanitasi layak ; (7) energi bersih dan terjangkau ; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi ; (9) industry, inovasi dan infrastruktur ; (10) berkurangnya kesenjangan ; (11) kota dan pemukiman yang berkelanjutan ; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab ; (13) penanganan perubahan iklim ; (14) ekosistem lautan ; (15) ekosistem daratan ; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang Tangguh ; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan. Poin pertama dalam SDGs adalah tanpa kemiskinan, tanpa kemiskinan ini berarti dapat mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Dimana kemiskinan merupakan kondisi seseorang tidak dapat atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum yang diperlukan untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Target yang dimuat dalam SDGs dalam rangka penanggulangan masalah kemiskinan yaitu : (1) Pengentasan kemiskinan ekstrem, dimana perhitungan garis kemiskinan internasional yaitu presentase

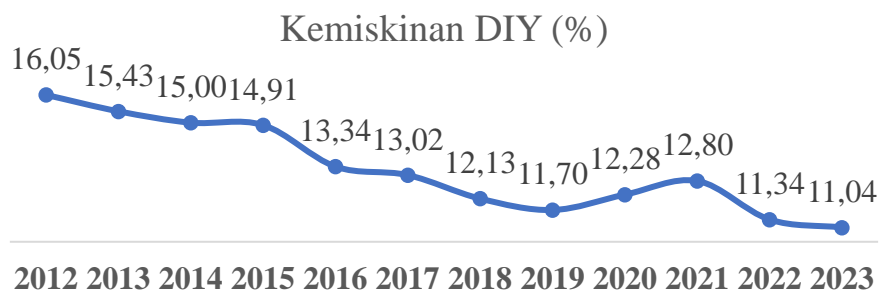
penduduk dengan pendapatan kurang dari 2,15% dollar AS pada PPP (Purchasing Power Parity) ; (2) Pelaksanaan sistem perlindungan sosial yaitu memastikan bahwa tahun 2030 upaya perlindungan sosial tepat bagi semua terutama kelompok miskin dan rentan ; (3) Hak yang sama atas kepemilikan, teknologi, layanan dasar dan sumber daya ekonomi yaitu menjadim bahwa seluruh masyarakat baik laki-laki maupun Perempuan terutama kelompok miskin dan rentan memiliki hak akses yang sama atas kebutuhan dasar ; (4) Membangun ketahanan terhadap bencana lingkungan, ekonomi dan sosial ; (5) Memobilisasi sumber daya untuk mengimplemenyasikan kebijakan untuk mengakhiri kemiskinan ; (6) Menciptakan kerangka kerja kebijakan yang berpihak pada kaum miskin dan sensitive gender (<https://sdgs.bappenas.go.id/> , 11 Mei 2024).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, presentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 9,36. Dari 38 Provinsi yang ada di Indonesia masih terdapat 16 Provinsi yang memiliki presentase kemiskinan di atas presentase kemiskinan nasional yaitu Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat dan Papua.



Gambar I.1. Pesentase Kemiskinan di 38 Provinsi Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2023)

Berdasarkan data di atas, salah satu provinsi yang memiliki presentase kemiskinan di atas presentase kemiskinan nasional yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah DIY Tahun 2023-2026 tingkat kemiskinan menjadi indikator dalam mengukur kesejahteraan penduduk dalam daerah jika dilihat dari aspek ekonomi serta penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan merupakan salah satu prioritas dalam kebijakan belanja daerah pada tahun 2023-2026. Berikut kondisi kemiskinan di DIY dalam kurun waktu 2012-2023.



Gambar 1.2 Presentase Kemiskinan di DIY 2012-2023 (Badan Pusat Statistik DI Yogyakarta, 2023 diolah)

Secara umum, presentase kemiskinan di DIY mengalami penurunan dari tahun 2012-2023, pada tahun 2012 presentase kemiskinan di DIY sebesar 16,05% dan menurun pada tahun 2023 menjadi 11,04 namun presentase kemiskinan di DIY mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 12,28 dan mulai mengalami penurunan pada tahun 2022 sebesar 11,34. Pada tahun 2020 peningkatan kemiskinan di DIY disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan DIY mengalami perlambatan perekonomian (Berita Resmi Statistik, 2020).

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan Keistimewaan , DIY memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dan urusan keistimewaan dimana urusan keistimewaan ini meliputi : (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur ; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah ; (3) kebudayaan ; (4) pertanahan ; dan (5) tata ruang. Dalam menjalankan urusan keistimewaan, DIY mendapatkan alokasi Dana Keistimewaan DIY. Dana Keistimewaan DIY (Danais) merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke DIY. Pedoman pelaksanaan urusan keistimewaan DIY dalam menentukan arah kebijakan, strategi dan pokok program keistimewaan sesuai dengan tujuan keistimewaan dituangkan dalam *Grand Design Keistimewaan*.

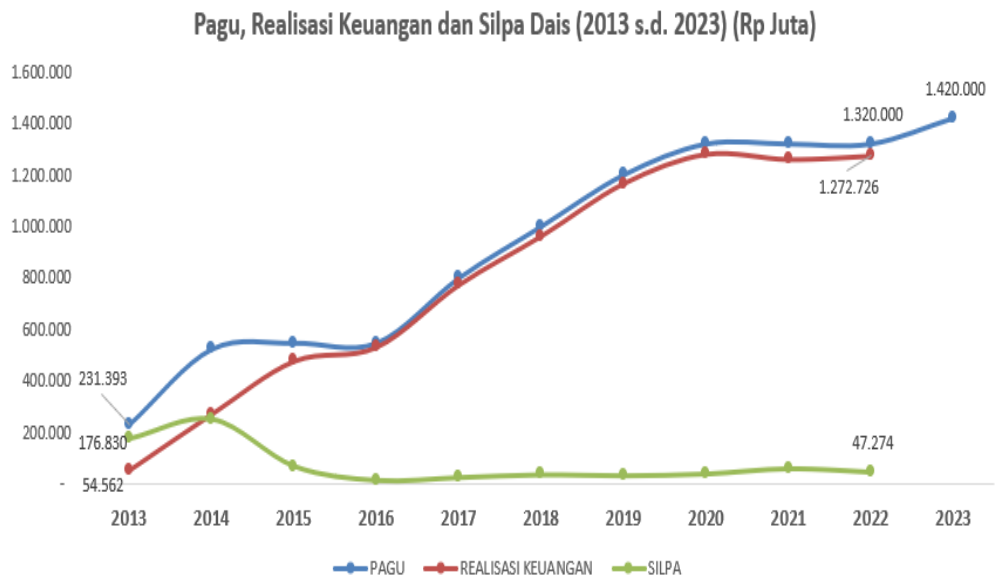
Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 Tentang *Grand Design Keistimewaan* DIY Tahun 2022-2042 menyebutkan bahwa untuk mengukur keberhasilan tujuan keistimewaan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Keistimewaan yang menunjukkan ketercapaian semua tujuan keistimewaan. Berikut IKU Keistimewaan DIY.

Tabel I.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Keistimewaan DIY

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)
1	Mewujudkan demokratis pemerintahan yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
2	Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)
		2. Indeks Kriminalitas 3. Angka Kemiskinan 4. Indeks Gini
3	Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ika-an dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia	1. Indeks Daerah Toleran 2. Indeks Pemberdayaan Gender
4	Menciptakan pemerintahan yang baik	1. Indeks Profesionalitas 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
5	Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Dalam IKU Keistimewaan di atas untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat salah satunya yaitu dengan angka kemiskinan, hal ini berarti bahwa penurunan angka kemiskinan di DIY merupakan salah satu tujuan keberhasilan urusan keistimewaan melalui peningkatan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat, sehingga capaian Danais diharapkan dapat membantu penurunan kemiskinan di DIY. Berikut capaian realisasi Dana Keistimewaan dari tahun 2013-2023.



Gambar I.1 Pagu, Realisasi Keuangan dan Silpa Danais (2013 s.d 2023) (Paniradya Kaistimewan, 2024 diolah)

Berdasarkan grafik di atas, realisasi keuangan setiap tahun mengalami peningkatan dan sisa anggaran mengalami penurunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sisa Dana Keistimewaan diperhitungkan dalam penyaluran Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga sisa Dana Keistimewaan digunakan untuk kegiatan yang telah direncanakan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga dalam hal ini sisa anggarana Dana Keistimewaan sebagai pengurang transfer Dana Keistimewaan pada tahun anggaran berikutnya. Peningkatan capaian Dana Keistimewaan setiap tahunnya diharapkan dapat berdampak terhadap kesejahteraan di DIY khususnya pada penurunan kemiskinan.

Kemiskinan di DIY menurut Suripto dan Lalu Subayil (2020) dipengaruhi oleh IPM dan Pertumbuhan Ekonomi. IPM menunjukkan kualitas pembangunan

manusia yang berjalan di suatu daerah, dalam hal ini IPM memengaruhi kemiskinan di DIY karena kemiskinan sendiri bersifat multidimensi yang memiliki arti bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan akan semua aspek kehidupan, dengan adanya IPM yang tinggi maka menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di DIY sejahtera yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar yang berarti memiliki tingkat kemiskinan yang rendah dan Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil dari kinerja suatu perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh nilai presentase perubahan PDB untuk nasional dan PDRB untuk daerah, dimana PDRB merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi di DIY meningkat dapat membantu penurunan tingkat kemiskinan karena adanya peningkatan produktivitas di DIY. Puspita Candra Bella dan Syamsul Huda (2023) menyebutkan bahwa TPT dapat meningkatkan kemiskinan di DIY, dengan adanya peningkatan presentase TPT di DIY yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang kurang memadai dapat menyebabkan masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan dan meningkatkan presentase kemiskinan di DIY. Sejauh yang diketahui belum ada yang mengaitkan kemiskinan di DIY dengan Dana Keistimewaan (Danais) sehingga dalam tesis ini ingin mengkaji kemiskinan di DIY dengan faktor yang memengaruhi berdasarkan literatur sebelumnya dengan menambah variabel Danais.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Capaian Danais terhadap Kemiskinan di DIY?

2. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Kemiskinan di DIY?
3. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terhadap Kemiskinan di DIY?
4. Bagaimana pengaruh Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di DIY?
5. Bagaimana pengaruh secara simultan Capaian Danais, IPM, TPT dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di DIY?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh Capaian Danais terhadap Kemiskinan di DIY
2. Menganalisis pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di DIY.
3. Menganalisis pengaruh TPT terhadap Kemiskinan di DIY.
4. Menganalisis pengaruh Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di DIY.
5. Menganalisis pengaruh secara simultan Capaian Danais, IPM, TPT dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di DIY.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis
 - a. Sebagai proses pembelajaran penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni serta sebagai peningkatan wawasan ilmiah penulis.
 - b. Sebagai peningkatan pemahaman penulis mengenai hubungan antara Alokasi Dana Keistimewaan dan Kemiskinan di DIY serta untuk menambah kontribusi pengetahuan penulis pada bidang ini.

2. Bagi akademisi
 - a. Sebagai penambah literasi akademik terutama terhadap isu-isu sosial dan ekonomi.
 - b. Sebagai rujukan penelitian selanjutnya bagi peneliti dan akademisi yang akan meneliti topik yang sama.
3. Bagi pemerintah
 - a. Sebagai bahan evaluasi efektivitas program dan kegiatan keistimewaan yang berperan dalam pengurangan kemiskinan.
 - b. Sebagai bahan identifikasi pelaksanaan Dana Keistimewaan yang dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan pengurangan kemiskinan.
4. Bagi masyarakat
 - a. Sebagai peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Keistimewaan di DIY.
 - b. Sebagai peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi program dan kegiatan keistimewaan di DIY.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

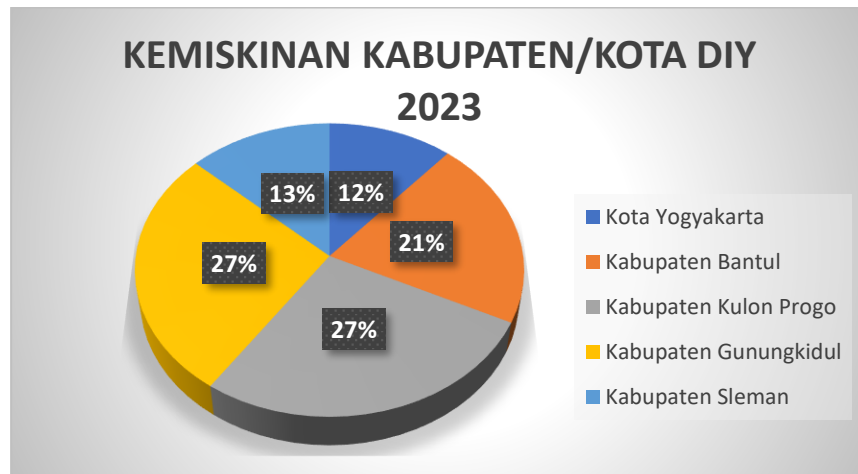
2.1 Kemiskinan

Kemiskinan diukur menggunakan konsep memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan makanan dari sisi ekonomi dan bukan makanan dari sisi pengeluaran. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

$$GK = GKM + GKNM.....(1)$$

Penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan hasil perhitungan dari Garis Kemiskinan (GK). Dimana GKM disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari yang diwakili oleh 52 jenis komoditi yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll sementara GKNM mencerminkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan minimum untuk sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Penelitian ini menggunakan presentase kemiskinan dimana presentase kemiskinan menunjukkan presentase penduduk yang hidup berada dibawah Garis Kemiskinan (GK) (<https://yogyakarta.bps.go.id/> , 13 Mei 2024).

Sebaran kemiskinan di DIY berdasarkan kabupaten/kota pada tahun 2023 disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut.



Gambar II.2 Sebaran Kemiskinan Kabupaten/Kota di DIY Tahun 2023 (Badan Pusat Statistik, 2023 diolah)

Berdasarkan data di atas, sebaran kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di DIY presentase terbesar berada di Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunungkidul dengan presentase kemiskinan yang sama yaitu 27% terhadap total penduduk miskin di Provinsi DIY sementara presentase kemiskinan paling rendah berada di Kabupaten Sleman. Gubernur DIY melalui Surat Wakil Gubernur menyampaikan 15 Lokus Kapanewon Penanggulangan Kemiskinan yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota DIY, dalam hal ini DIY merupakan daerah yang memiliki frase Keistimewaan sehingga dalam penanggulangan kemiskinan ini terdapat kolaborasi antara Kampung, Kampus, Kantor dan Kraton yang didukung oleh Korporasi akan bisa mewujudkan visi dan misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2027 s.d 2022. Berikut analisis kebutuhan kegiatan dalam mengintervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

Tabel II.2 Kebutuhan kegiatan dalam mengintervensi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY

Kabupaten	Kapanewon	Intrvensi Program Kegiatan
Gunungkidul	Saptosari	Hibah bansos tunai dan non tunai beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Sosialisasi Generasi Berencana ;Pemenuhan gizi potensi lokal
Gunungkidul	Playen	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Akses air bersih, sanitasi dan listrik ; Pemenuhan gizi potensi lokal ; Sosialisasi Generasi Berencana
Gunungkidul	Gedangsari	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM Stimulasi RTLH ; Akses air bersih, sanitasi dan listrik ; Pemenuhan gizi potensi lokal ; Sosialisasi Generasi Berencana
Gunungkidul	Nglipar	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Akses air bersih, sanitasi dan listrik ; Pemenuhan gizi potensi lokal ; Sosialisasi Generasi Berencana
Gunungkidul	Ponjong	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah beserta

Kabupaten	Kapanewon	Intrvensi Program Kegiatan
		edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Akses air bersih ; Pemenuhan gizi potensi lokal ; Sosialisasi Generasi Berencana
Gunungkidul	Tepus	Hibah bansos tunai dan non tunai beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Akses air bersih ; Pengembangan Wisata potensi lokal
Gunungkidul	Karangmojo	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak (putus) sekolah beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Akses air bersih ; Pengembangan wisata potensi lokal
Kulon Progo	Sentolo	Hibah bansos tunai dan non tunai beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Akses air bersih, sanitasi dan listrik ; Pemenuhan gizi potensi lokal
Kulon Progo	Kokap	Hibah bansos tunai dan non tunai beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Pemenuhan gizi potensi lokal ; Mitigasi bencana
Kulon Progo	Pengasih	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Akses air bersih ; Pemenuhan gizi potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan

Kabupaten	Kapanewon	Intrvensi Program Kegiatan
Kulon Progo	Samigaluh	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Akses air bersih ; Pemenuhan gizi potensi lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan ; Mitigasi bencana dan konservasi alam
Bantul	Imogiri	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia beserta edukasi ; Pemberdayaan UMKM ; Akses listrik ; Pemenuhan gizi potensi lokal ; Mitigasi bencana dan konservasi alam
Sleman	Tempel	Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Akses air bersih, sanitasi dan listrik ; Pemenuhan gizi potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
Sleman	Seyegan	Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Akses air bersih, sanitasi dan listrik ; Pemenuhan gizi potensi lokal ; Pengembangan wisata potensi lokal
Sleman	Prambanan	Pemberdayaan UMKM ; Stimulasi RTLH ; Akses air bersih, sanitasi dan listrik; Pemenuhan gizi potensi lokal

Penyebab kemiskinan di DIY dijelaskan pada literatur-literatur sebelumnya yang melakukan penelitian mengenai faktor penyebab kemiskinan

di DIY. Pertama literatur sebelumnya yang ditulis oleh Suropto dan Lalu Subayil (2020) menyebutkan bahwa tingkat pendidikan, pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia sementara tingkat pengangguran tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DIY. pendidikan merupakan proses jangka panjang dengan menggunakan prosedur sistematis yang terorganisir untuk mengetahui dan mempelajari pengetahuan konseptual, sehingga dengan tingginya tingkat pendidikan di DIY akan meningkatkan kekuatan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung pembangunan di DIY. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil dari kinerja suatu perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah, pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh nilai presentase perubahan PDB untuk nasional dan PDRB untuk daerah, dimana PDRB merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, sehingga ketika pertumbuhan ekonomi di DIY meningkat dapat membantu penurunan tingkat kemiskinan karena adanya peningkatan produktivitas di DIY. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang berjalan di suatu daerah, dalam hal ini IPM memengaruhi kemiskinan di DIY karena kemiskinan sendiri bersifat multidimensi yang memiliki arti bahwa kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan akan semua aspek kehidupan, dengan adanya IPM yang tinggi maka menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat di DIY sejahtera yaitu dapat memenuhi kebutuhan dasar yang berarti memiliki tingkat kemiskinan yang rendah.

Kedua literatur sebelumnya ditulis oleh Puspita Candra Bella dan Syamsul Huda (2023) menyebutkan bahwa nilai IPM di DIY mengalami peningkatan pada tahun 2017 sd 2021, dengan nilai IPM yang tergolong tinggi serta mengalami peningkatan dengan hampir 80% di setiap tahunnya presentase kemiskinan di DIY masih tinggi sehingga hal ini menunjukkan bahwa tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat belum sejalan dengan tujuan pembangunan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di DIY mengalami peningkatan di tahun 2020 hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi covid-19. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga dengan peningkatan IPM di DIY setiap tahunnya dapat menekan angka kemiskinan di DIY yang masih tinggi, selanjutnya tingkat pengangguran terbuka memiliki pengaruh yang positif signifikan di DIY hal ini disebabkan karena dengan adanya peningkatan presentase TPT di DIY yang disebabkan oleh lapangan pekerjaan yang kurang memadai dapat menyebabkan masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan dan meningkatkan presentase kemiskinan di DIY.

Ketiga literatur sebelumnya ditulis oleh Imam Ma'ruf Azhari (2023) yang berjudul menyebutkan bahwa Provinsi DIY memiliki presentase penduduk miskin yang tinggi walaupun mengalami penurunan pada tahun 2020 ke tahun 2021 namun presentase penduduk miskin di DIY masih di atas 10%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di DIY diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di DIY salah satunya melalui peningkatan sektor pariwisata, dalam penelitian ini menyebutkan bahwa sektor pariwisata di DIY akan memberikan efek berganda

atau *multiplier effect* pada sektor lainnya seperti industri kerajinan, restoran, akomodasi, jasa transportasi dan penginapan atau perhotelan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel dengan menggabungkan data *time series* dan data *cross section* yang terdiri atas lima kabupaten atau kota selama enam tahun. Hasil dari penelitian ini bahwa peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM) dan peningkatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY, sementara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Obyek Wisata tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan atau penurunan kemiskinan di DIY. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan PDRB belum tentu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat serta peningkatan jumlah obyek wisata di DIY belum dapat menanggulangi masalah kemiskinan di DIY.

Keempat literatur sebelumnya ditulis oleh Angger Gigih Prasetyo dan Bachtiar Fitanto (2023) menyebutkan bahwa DIY merupakan provinsi yang berbeda dengan provinsi lain karena mendapatkan gelar “Istimewa”. DIY memiliki tingkat upah yang rendah dan perilaku masyarakat yang mengandalkan sumber daya alam sekitar untuk konsumsi sehari-hari hal ini mempengaruhi rendahnya pengeluaran masyarakat DIY yang menjadi tolok ukur dalam perhitungan tingkat kemiskinan itu sendiri sehingga hal ini menjadi permasalahan karena konsumsi masyarakat merupakan indikator untuk menggerakkan roda perekonomian Provinsi DIY. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga diindikasikan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di DIY karena nilai IPM mencerminkan kualitas pembangunan manusia yang memiliki

komponen seperti pendidikan, kesehatan dan pengeluaran sehingga dengan meningkatnya nilai IPM akan mendukung peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan hal ini akan berdampak kepada penurunan kemiskinan di DIY. Penyebab kemiskinan selanjutnya berdasarkan literatur ini yaitu tingkat pengangguran terbuka, dengan tingginya presentase tingkat pengangguran terbuka di DIY maka hal ini menunjukkan rendahnya tenaga kerja yang terserap di DIY yang akan berdampak kepada peningkatan presentase kemiskinan di DIY. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel yang terdiri atas lima kabupaten/kota dan rentan waktu selama 2012-2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan hal ini berarti ketika IPM di DIY meningkat maka kemiskinan di DIY akan menurun sehingga pemerintah Provinsi DIY perlu mengupayakan peningkatan IPM di DIY untuk menekan angka kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan hal ini berarti ketika TPT di DIY meningkat maka kemiskinan di DIY juga akan meningkat, dengan tingginya tingkat TPT maka banyak masyarakat yang tidak bekerja dan memiliki produktivitas yang rendah dan kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi sehingga tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan. Indikator di BPS terkait konsumsi masyarakat yang menjadi tolok ukur kemiskinan tidaklah salah namun untuk melihat kondisi kemiskinan di DIY diperlukan aspek multidimensi, hal ini dikarenakan adanya fenomena non-transaksional seperti faktor-faktor sosial budaya yang tidak diperhitungkan secara statistika sehingga menyebabkan biasanya penggambaran kondisi kemiskinan yang sebenarnya di DIY.

2.2 Dana Keistimewaan

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Utusan Keistimewaan, DIY memiliki kewenangan dalam menjalankan urusan pemerintahan dan urusan keistimewaan. Urusan keistimewaan atau kewenangan keistimewaan merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana yang diatur dalam undang-undang tentang pemerintah Daerah. Urusan keistimewaan meliputi (1) Urusan Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur ; (2) Urusan Kelembagaan Pemerintah Daerah ; (3) Urusan Kebudayaan ; (4) Urusan Pertanahan; dan (5) Urusan Tata Ruang. Dana Keistimewaan merupakan anggaran yang berasal dari APBN dan digunakan untuk penganggaran pelaksanaan kewenangan dan penugasan Urusan Keistimewaan. Urusan keistimewaan dilaksanakan oleh Kasultanan, Kadipaten dan Pemerintah Daerah yang dapat ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan penganggaran Dana Keistimewaan sebagai berikut.

1. Kasultanan :
 - a. Kasultanan melakukan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kasultanan yang bersumber dari Dana Keistimewaan;
 - b. Kasultanan melakukan usulan rencana kebutuhan anggaran Kasultanan yang bersumber dari Dana Keistimewaan;
 - c. Kasultanan melakukan penetapan atau penunjukan pelaksana Dana Keistimewaan;

- d. Kasultanan melakukan penetapan aktivitas Kasultanan yang akan dianggarkan menggunakan Dana Keistimewaan berupa hibah;
 - e. Kasultanan melakukan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Keistimewaan.
2. Kadipaten :
- a. Kadipaten melakukan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Kadipaten yang bersumber dari Dana Keistimewaan;
 - b. Kadipaten melakukan usulan rencana kebutuhan anggaran Kadipaten yang bersumber dari Dana Keistimewaan;
 - c. Kadipaten melakukan penetapan atau penunjukan pelaksana Dana Keistimewaan;
 - d. Kadipaten melakukan penetapan aktivitas Kadipaten yang dianggarkan menggunakan Dana Keistimewaan berupa hibah;
 - e. Kadipaten melakukan pelaksanaan, pengendalian dan penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Keistimewaan.
3. Pemerintah daerah bertugas melakukan penyusunan Peraturan Gubernur untuk mengatur mengenai pengelolaan Dana Keistimewaan.

Dalam pengelolaan Dana Keistimewaan terdapat regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pengelolaan Dana Keistimewaan. Berikut ringkasan dasar hukum pengelolaan Dana Keistimewaan.

Tabel II.3 Dasar Hukum Pengelolaan Dana Keistimewaan

No	Peraturan	Tentang
1	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950	Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah

No	Peraturan	Tentang
		terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta
2	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014	Pemerintahan Daerah
3	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012	Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
4	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950	Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950
5	Peraturan Menteri Keuangan 103/PMK.07/2013	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY
6	Peraturan Menteri Keuangan 104/PMK.07/2013	Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2013
7	Peraturan Menteri Keuangan 36/PMK.07/2014	Pedoman Umum dan Alokasi Dana Keistimewaan DIY TA 2014
8	Peraturan Menteri Keuangan 124/PMK.07/2015	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY
9	Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.07/2017	Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan DIY
10	Peraturan Menteri Keuangan 15/PMK.07/2020	Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
11	Peraturan Menteri Keuangan 35/PMK.07/2020	Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional
12	Peraturan Menteri Keuangan 94/PMK.07/2021	Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi

No	Peraturan	Tentang
		Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
13	PerDanais DIY Nomor 1 Tahun 2013	Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
14	PerDanais DIY Nomor. 1 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
15	PerDanais DIY Nomor 2 Tahun 2015	Tata Cara Pengisian Jabatan, Pelantikan, Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
16	PerDanais DIY Nomor 3 Tahun 2015	Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
17	PerDanais DIY Nomor 1 Tahun 2017	Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
18	PerDanais DIY Nomor 2 Tahun 2017	Tata Ruang Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten
19	PerDanais DIY Nomor 3 Tahun 2017	Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan
20	PerDanais DIY Nomor 1 Tahun 2018	Kelembagaan Pemerintah DIY
21	Peraturan Gubernur DIY Nomor 58 Tahun 2013	Pengelolaan Dana Keistimewaan
22	Peraturan Gubernur DIY Nomor 18 Tahun 2014	Pengelolaan Dana Keistimewaan
23	Peraturan Gubernur DIY Nomor 37 Tahun 2014	Pengelolaan Dana Keistimewaan
24	Peraturan Gubernur DIY Nomor 113 Tahun 2015	Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan
25	Peraturan Gubernur DIY Nomor 33 Tahun 2016	Pengelolaan Dana Keistimewaan
26	Peraturan Gubernur DIY Nomor 140 Tahun 2018	Pengelolaan Dana Keistimewaan
27	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019	Pengelolaan Dana Keistimewaan
28	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021	Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 100 tahun 2020 tentang Pedoman

No	Peraturan	Tentang
		Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.
29	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.07/2023	Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewan Yogyakarta
30	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 163 Tahun 2023	Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
31	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2023	Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan

Dalam mendukung program kegiatan pembangunan di Provinsi DIY, Gubernur DIY menyusun *Grand Design* Keistimewaan DIY Tahun 2022-2042 yang digunakan sebagai haluan dan pedoman dalam menyusun RPJPD dan RPJMD untuk menguatkan urusan keistimewaan yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro dalam hal ini yaitu gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dan program dalam bentuk kerangka regulasi serta pendanaan yang bersifat indikatif. *Grand Design* Keistimewaan DIY Tahun 2022-2024 ditetapkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut.

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan keistimewaan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5. Mengoptimalkan partisipasi Kasultanan/Kadipaten, masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya (LSM), organisasi politik dan perguruan tinggi sehingga menjadi produk kolektif atau budaya saling silang.

Dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 Tentang *Grand Design Keistimewaan* DIY Tahun 2022-2042 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan daerah DIY yaitu pertumbuhan ekonomi ; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ; Indeks Gini ; Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan. Sasaran pembangunan daerah tersebut didukung oleh indikator output dalam urusan keistimewaan dan program Dana Keistimewaan. Berikut program, indikator output dan dukungan terhadap indikator outcome Pembangunan Urusan Keistimewaan tahun 2022-2024.

Tabel II.4 Program, indikator output dan dukungan terhadap indikator outcome Pembangunan Urusan Keistimewaan tahun 2022-2024

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Outcome urusan Keistimewaan	Urusan Keistimewaan	Program DANAIS	Indikator Output
- Pertumbuhan Ekonomi - Indeks Pembangunan	1. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) 2.	Kebudayaan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan	1. Jumlah perlindungan obyek kebudayaan yang

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Outcome urusan Keistimewaan	Urusan Keistimewaan	Program DANAIS	Indikator Output
<p>nan Manusia (IPM)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indeks Gini - Tingkat Pengangguran Terbuka - Tingkat Kemiskinan 	<p>Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 3.</p> <p>Indeks Kriminalitas 4.</p> <p>Tingkat Kemiskinan 5.</p> <p>Indeks Gini 6.</p> <p>Indeks Daerah Toleran 7.</p> <p>Indeks Pemberdayaan Gender 8.</p> <p>Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 8.</p> <p>Indeks Profesionalitas 9.</p> <p>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p>		Yogyakarta urusan Kebudayaan	<p>dilakukan di tahun N 2.</p> <p>Jumlah Pengembangan obyek kebudayaan</p> <p>3. Jumlah Pemanfaatan obyek kebudayaan</p> <p>4. Jumlah Pembinaan kepada pelaku/ lembaga/institusi pelindung, pengembang dan pemanfaat obyek kebudayaan</p> <p>5. Indeks Kepuasan Pengunjung Museum</p> <p>6. Jumlah desa mandiri budaya tahun n</p> <p>7. Jumlah keawarga terbina dan mampu menjalankan fungsinya</p> <p>8. Jumlah kerjasama yang direalisasikan dalam tahun n</p> <p>9. persentase sekolah yang</p>

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Outcome urusan Keistimewaan	Urusan Keistimewaan	Program DANAIS	Indikator Output
				menerapkan pendidikan berkarakter
		Kelembagaan	Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1. Jumlah regulasi kelembagaan yang disusun 2. Jumlah sistem informasi yang dibangun untuk kemudahan pelayanan kepada masyarakat 3. Jumlah kegiatan penyampaian informasi kepada masyarakat
		Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Kedudukan, Tugas, Dan Wewenang Gubernur Dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah kegiatan yang dilakukan pada semua tahap pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
		Tata Ruang	Program Penyelenggaraan	1. Jumlah perencanaan

Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Outcome urusan Keistimewaan	Urusan Keistimewaan	Program DANAIS	Indikator Output
			ar aan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang	<p>1. Jumlah satuan ruang strategis</p> <p>2. Jumlah pemanfaatan Tata ruang di satuan ruang strategis</p> <p>3. Jumlah Pengendalian pemanfaatan Tata ruang di satuan ruang strategis</p> <p>4. Jumlah pengawasan pemanfaatan Tata ruang pada satuan ruang strategis</p>
		Pertanahan	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Pertanahan	<p>1. Jumlah tanah kasultanan dan kadipaten yang dikelola (penatausahaan, pemeliharaan dokumen, pengawasan)</p> <p>2. Jumlah tanah kasultanan dan kadipaten yang dimanfaatkan (Perlindungan, Penggunaan pelepasan)</p>

Berdasarkan data program, indikator output dan dukungan terhadap indikator outcome Pembangunan Urusan Keistimewaan tahun 2022-2024 terdapat sasaran pembangunan daerah yaitu penurunan tingkat kemiskinan, sehingga dengan adanya alokasi Dana Keistimewaan di DIY ini diharapkan dapat membantu terwujudnya sasaran pembangunan daerah melalui program kegiatan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia

Dalam pembangunan suatu negara diharapkan bahwa hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh penduduk yang ada di negara tersebut. Pada tahun 1990 *Unites Nations Development Programme* (UNDP) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR). IPM menggambarkan penduduk yang dapat menikmati atau mengakses hasil pembangunan suatu negara untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar yang lain. Terdapat tiga (3) dimensi dasar dalam pembentukan IPM yaitu : (1) Umur panjang dan hidup sehat ; (2) Pengetahuan ; (3) Standar hidup yang layak. Perhitungan IPM digunakan sebagai pengukuran keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup masyarakat serta IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah atau negara. Di Indonesia sendiri IPM menjadi alat ukuran kinerja bagi Pemerintah Indonesia ketika presentase IPM tinggi, maka kinerja pemerintah bisa disebut berhasil karena dengan IPM yang tinggi dapat menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia dapat merasakan hasil pembangunan di Indonesia

untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya, selanjutnya nilai IPM di Indonesia digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU). Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata geometrik dengan indikator yang digunakan yaitu Angka Harapan Lama Sekolah dan Produk Nasional Bruto (PNB) (<https://yogyakarta.bps.go.id/> , 14 Mei 2024).

2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Secara konsep pengangguran terbuka dapat diterjemahkan dalam beberapa pengertian yang pertama seseorang disebut sebagai pengangguran terbuka ketika tidak memiliki pekerjaan dan mencari pekerjaan, kedua mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha, ketiga mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang keempat mereka yang memiliki pekerjaan namun belum mulai bekerja sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.

1. Mencari pekerjaan merupakan kegiatan seseorang mencari pekerjaan dengan kondisi mereka yang belum pernah bekerja dan sedang mencari pekerjaan, yang sudah pernah bekerja namun berhenti dari pekerjaannya dan yang sedang bekerja namun berusaha mendapatkan pekerjaan lain. Dalam hal ini, mencari pekerjaan terhitung mereka yang berusaha mendapatkan pekerjaan dalam kurun lebih dari satu minggu.

2. Mempersiapkan usaha merupakan kegiatan seseorang sedang mempersiapkan usaha baru yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan atas resiko sendiri baik dengan atau tanpa memperkerjakan buruh atau pekerja yang dibayar maupun tidak dibayar. Mempersiapkan usaha dalam hal ini merupakan kegiatan sebelum usaha terbangun yaitu masih dalam tahap pengumpulan modal/alat/perlengkapan, mencari lokasi atau tempat usaha, sedang mengurus izin usaha (<https://yogyakarta.bps.go.id/>, 14 Mei 2024).

2.5 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah secara bruto yang dihasilkan dari seluruh sektor perekonomian dalam suatu wilayah. Nilai tambah bruto ini berupa komponen-komponen dari pendapatan faktor produksi seperti upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan laba atau keuntungan. Transaksi ekonomi yang dihitung dalam perhitungan ini yaitu terjadi pada suatu wilayah domestik (provinsi atau daerah) tanpa memperhatikan transaksi yang dilaksanakan dari masyarakat dari daerah tersebut (residen) atau masyarakat dari luar daerah tersebut (non residen). Produk domestik merupakan seluruh barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di suatu wilayah yang menghasilkan pendapatan domestik sementara produk regional merupakan produk domestik yang ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah atau luar negeri dengan dikurangi oleh pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar

daerah atau luar negeri. Laju pertumbuhan PDRB merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu dengan membandingkan nilai PDRB pada dua waktu yang berbeda dan disajikan dalam bentuk presentase. Semakin besar presentase yang dihasilkan dari nilai Laju pertumbuhan PDRB maka semakin cepat pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut (<https://yogyakarta.bps.go.id/> , 19 Mei 2024). Berikut formulasi perhitungan laju pertumbuhan PDRB.

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (2)$$

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu dibutuhkan dalam penulisan tesis ini sebagai perbandingan dan acuan terhadap penelitian yang dilakukan saat ini. Penelitian terdahulu sebagai pembangun dasar dalam membentuk pengetahuan dalam memahami konsep serta teori dalam penulisan tesis ini. Melalui penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi celah pengetahuan serta meningkatkan wawasan metodologis penelitian selanjutnya penelitian terdahulu juga dapat mendukung teoritis untuk hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini.

Tabel II.5 Penelitian Terdahulu

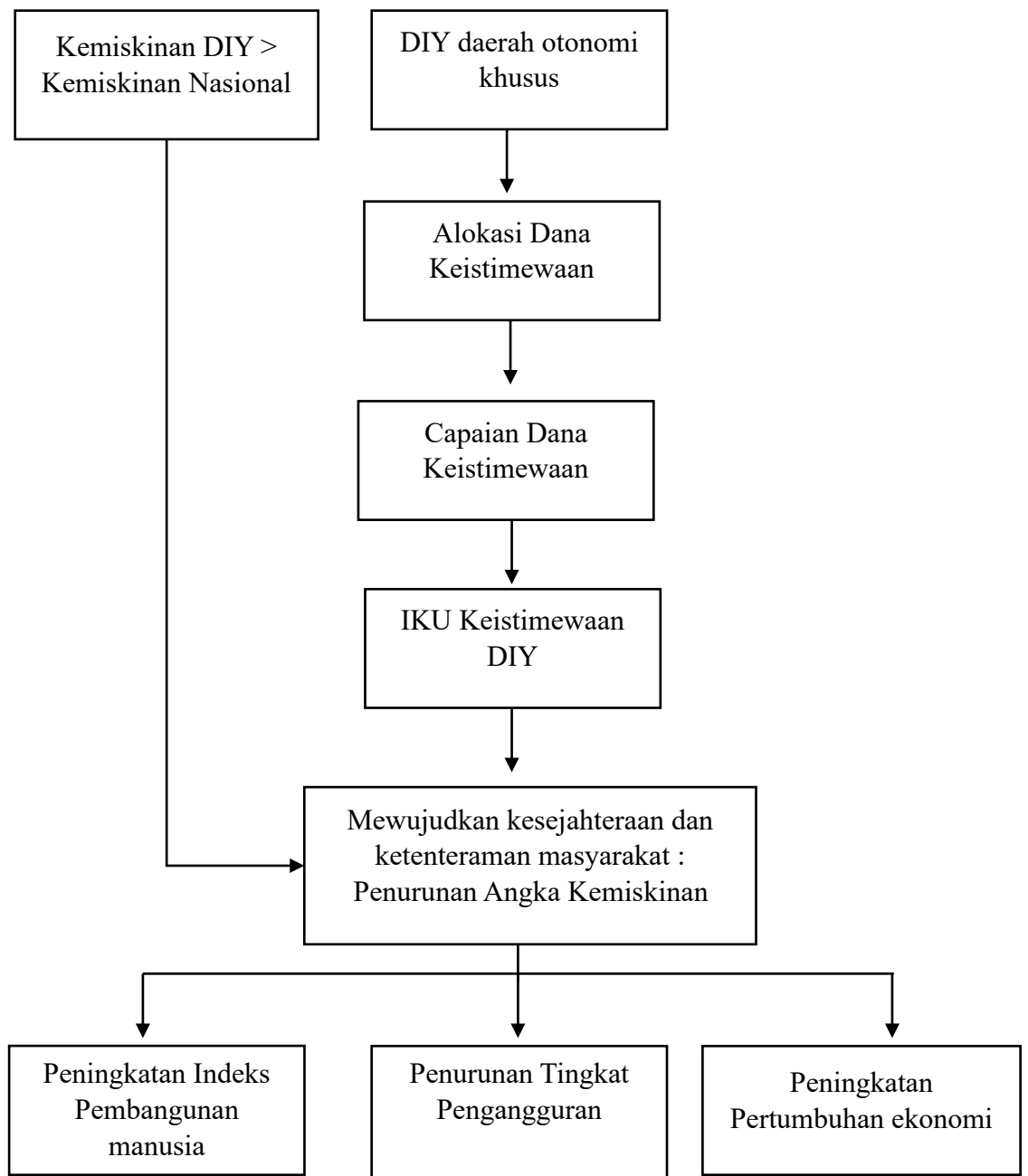
No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
1	Matthew Robson, Frank Vollmer, Basak Bercin Dogan, Nils Grede ; Distributional Impacts Of Cash Transfers On The Multidimensi	Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis kausalitas dampak distribusi ESSN terhadap kemiskinan multidimensi. Hasil penelitian ini	Persamaan : - Menganalisis mengenai anggaran atau dana dari pusat atau negara yang disalurkan untuk mengatasi kemiskinan. Perbedaan :

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
	Poverty Of Refugees : The Emergency Social Safety Net in Turkey ; ELSEVIER ; 2024	menunjukkan bahwa ESSN secara signifikan mengurangi intensitas kemiskinan multidimensi di antara penerima manfaat di Turkey. Pengurangan yang signifikan ditemukan pada dimensi ketahanan pangan, standar hidup, kesehatan dan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menganalisis alokasi <i>cash transfer</i> (ESSN) terhadap tingkat kemiskinan di Turkey, penelitian ini menganalisis alokasi Dana Keistimewaan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.
2	Rufus Adebayo Ajisafe, Solomon Oluwaseun Okunade, Musbau Olaniyan Fatai ; Modelling Structural Breaks In Social Cash Transfers Effect On Poverty And Inquality Reduction In Afrika : A Case of Nigeria ; ELSEVIER ; 2024	Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan <i>Dynamic Ordinary Least Squares</i> . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>Social Cash Transfer</i> (SCT) mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan di Nigeria.	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis mengenai anggaran atau dana dari pusat atau negara yang disalurkan untuk mengatasi kemiskinan. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menganalisis alokasi <i>Social Cash Transfer</i> (SCT) terhadap tingkat kemiskinan di Nigeria, penelitian ini menganalisis alokasi Dana Keistimewaan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.
3	Anouk Patel-Campillo, V.B. Salas Garcia ; Breaking The Poverty Cycle? Conditional Cash Transfer And Higher Education Attainment ; ELSEVIER ; 2022.	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Rosenbaum dengan menguji sensitivitas hasil propensity-matched. Hasil penelitian ini menyebutkan program <i>cash transfer</i> memiliki dampak positif terhadap pendidikan	<p>Persamaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menganalisis mengenai anggaran atau dana dari pusat atau negara yang disalurkan untuk mengatasi kemiskinan. <p>Perbedaan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian terdahulu menganalisis alokasi <i>Cash Transfer</i> terhadap tingkat kemiskinan di Peru, penelitian ini menganalisis alokasi Dana Keistimewaan

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
		tinggi di Peru, untuk pengurangan kemiskinan cash transfer memiliki pengaruh dalam jangka pendek, namun untuk memutus siklus kemiskinan diperlukan jangka panjang sehingga kebijakan ini perlu dipertimbangkan.	terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.
4	Kennedy Machira, Wisdom Richard Mgomezulu, Mark Malata ; Understanding poverty dimensions and transitions in Malawi : A Panel Data Approach ; ELSEVIER ; 2023.	Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel menggunakan data Survei Pengukuran Standar Hidup (LSMS) dari Bank Dunia. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor sosial ekonomi seperti usia, jenis kelamin, ukuran rumah tangga, tingkat pendidikan dan akses kredit memiliki pengaruh signifikan terhadap dimensi-dimensi kemiskinan di Malawi.	Persamaan : - Fokus utama penelitian mengenai kemiskinan Perbedaan : - Penelitian terdahulu meneliti apakah faktor sosial ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Malawi, penelitian ini menganalisis alokasi Dana Keistimewaan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.
5	Apriliana Tri Widyastuti, Djoni Hartono, Danar Sutopo Sidig, Estiana Rusmawati ; Financial Inclusion's Impact On Energy Poverty : Evidence From Indonesia ; ELSEVIER ; 2023	Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Two Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa inklusi keuangan memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap kemiskinan	Persamaan : - Fokus utama penelitian mengenai kemiskinan Perbedaan : - Penelitian terdahulu meneliti apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia, penelitian ini menganalisis alokasi Dana

No	Keterangan	Alat Analisis dan Hasil Penelitian	Persamaan Perbedaan
		di Indonesia, inklusi keuangan ini mencakup akses rumah tangga ke bank, kredit dan asuransi.	Keistimewaan terhadap kemiskinan di Provinsi DIY.

2.7 Kerangka Pemikiran



Gambar II.3 Kerangka Pemikiran

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah otonomi khusus yang mendapatkan alokasi dana otonomi khusus atau yang biasa disebut dengan Dana Keistimewaan karena DIY merupakan daerah yang istimewa. Untuk menilai kinerja keistimewaan DIY ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Keistimewaan yang salah satu tujuannya yaitu mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat dengan menggunakan indikator angka kemiskinan. Penurunan kemiskinan di DIY sendiri dapat diatasi melalui peningkatan IPM, penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan masing-masing indikator tersebut didukung oleh serapan capaian Dana Keistimewaan melalui terealisasinya program kegiatan keistimewaan yang telah ditetapkan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran pembangunan.

2.8 Pengembangan Hipotesis

Proses perumusan pernyataan sementara untuk pengujian hubungan antara dua atau lebih variabel merupakan proses pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis didasarkan pada penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu, dana alokasi dari pusat memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan suatu wilayah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Dana Keistimewaan sebagai variabel independen yang diduga memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DIY, pengembangan hipotesis dari penelitian ini yaitu dengan adanya alokasi dana diluar dana reguler APBD yang diserahkan pusat ke DIY apakah dapat menurunkan tingkat kemiskinan di DIY melalui kewenangan keistimewaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah

Daerah, sehingga penelitian ini menduga bahwa capaian Dana Keistimewaan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

Indikator yang digunakan dalam formulasi IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak dimana indikator tersebut mencerminkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mencerminkan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah, kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan baik makanan maupun non makanan. Ketika IPM disuatu wilayah tinggi artinya masyarakat dalam wilayah tersebut memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dapat dilihat dari kemudahan masyarakat mencapai indikator dalam pengukuran IPM yaitu masyarakat memiliki kesehatan yang baik, pendidikan yang tinggi dan kehidupan yang layak artinya penduduk wilayah tersebut masuk ke dalam kategori tidak miskin, sehingga penelitian ini menduga bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

Pengangguran merupakan situasi dimana seseorang tidak dalam masa bekerja dan tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi hidupnya maka seseorang tersebut masuk dalam kategori miskin. Ketika TPT disuatu wilayah tinggi artinya masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup baik makanan ataupun non makanan di wilayah tersebut semakin tinggi, sehingga penelitian ini menduga bahwa TPT memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

2.9 Pernyataan Hipotesis

Pernyataan hipotesis dikembangkan dari landasan teori serta literatur sebelumnya yang digunakan penulisan ini. Berdasarkan landasan teori serta literatur sebelumnya maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Pernyataan Hipotesis Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan di DIY

Diduga capaian Dana Keistimewaan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di DIY, dimana ketika capaian Dana Keistimewaan meningkat maka tingkat kemiskinan di DIY akan menurun dan sebaliknya ketika capaian Dana Keistimewaan menurun maka tingkat kemiskinan di DIY akan meningkat.

2. Pernyataan Hipotesis IPM terhadap Kemiskinan di DIY

Diduga tingkat IPM memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di DIY, dimana ketika tingkat IPM meningkat maka tingkat kemiskinan di DIY akan menurun dan sebaliknya ketika tingkat IPM menurun maka tingkat kemiskinan di DIY akan meningkat.

3. Pernyataan Hipotesis TPT terhadap Kemiskinan di DIY

Diduga TPT memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, dimana ketika tingkat TPT meningkat maka tingkat kemiskinan di DIY akan meningkat dan sebaliknya ketika tingkat TPT menurun maka tingkat kemiskinan di DIY akan menurun.

4. Pernyataan Hipotesis Laju Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di DIY

Diduga tingkat Laju Pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di DIY, dimana ketika tingkat Laju Pertumbuhan PDRB meningkat maka tingkat kemiskinan di DIY akan menurun dan sebaliknya ketika tingkat Laju Pertumbuhan PDRB menurun maka tingkat kemiskinan di DIY akan meningkat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data kemiskinan, IPM, TPT dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota di DIY 2014 s.d 2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik dan data capaian Dana Keistimewaan yang diperoleh dari Laporan Tahap Akhir Capaian Dana Keistimewaan tahun 2014 s.d 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel. Data panel merupakan data gabungan dari time series dan data cross section, dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu dari tahun 2014 s.d 2023 di 5 Kabupaten/Kota di DIY.

3.2 Definisi Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan variabel *dependen* (variabel terikat) kemiskinan dengan variabel *independen* (variabel bebas) yaitu Capaian Dana Keistimewaan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

3.3 Variabel *dependen* (terikat)

Variabel *dependen* merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel yang dijelaskan oleh variabel bebas. Variabel *dependen* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kemiskinan yang diwakili oleh data presentase penduduk miskin di Kabupaten/Kota di DIY pada kurun waktu 2014 s.d 2023 yang diperoleh dari BPS.

3.4 Variabel *independen* (bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau menjelaskan variabel dependen. Berikut variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Capaian Dana Keistimewaan

Dana keistimewaan merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana transfer ke DIY. Capaian dana keistimewaan merupakan presentase realisasi keuangan terhadap pagu anggaran. Penelitian ini menggunakan capaian dana keistimewaan dari 5 Kabupaten/Kota di DIY dalam kurun waktu 2014 s.d 2023. Data capaian dana keistimewaan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Tahap Akhir Capaian Dana Keistimewaan.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM menggambarkan penduduk yang dapat menikmati atau mengakses hasil pembangunan suatu negara untuk memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar yang lain. Terdapat tiga (3) dimensi dasar dalam pembentukan IPM yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup yang layak. Penelitian ini menggunakan data IPM dari 5 Kabupaten/Kota di DIY dalam kurun waktu 2014 s.d 2023. Data IPM merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penelitian ini menggunakan data TPT dari 5 Kabupaten/Kota di DIY dalam kurun waktu 2014-2023. Data TPT merupakan data sekunder yang diperoleh dari BPS.

4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laju pertumbuhan PDRB merupakan nilai yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dalam periode waktu tertentu dengan membandingkan nilai PDRB pada dua waktu yang berbeda dan disajikan dalam bentuk presentase. Penelitian ini menggunakan data Laju pertumbuhan PDRB riil atas dasar harga konstan 2010 dari 5 Kabupaten/Kota di DIY dalam kurun waktu 2014-2023 yang diperoleh dari BPS.

3.5 Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan pengolahan data dengan analisis kuantitatif metode regresi data panel untuk melakukan penelitian apakah variabel independen memiliki pengaruh variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Data panel merupakan gabungan dari data time series dan data cross section, dengan menggunakan dua gabungan jenis data ini maka data panel akan menghasilkan degree of freedom yang lebih besar, selanjutnya dengan menggunakan data panel masalah omitted-variabel (penghilangan variabel) dapat teratasi karena terdapat gabungan informasi dari data time series dan data

cross section (Widarjono, 2013). Berikut model persamaan regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini.

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 Capaian_Danais_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PertumbuhanPDRB_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

Keterangan :

- Kemiskinan = Presentase Penduduk Miskin (Persen)
- Capaian Danais = Presentase Capaian Keuangan Dana Keistimewaan (Persen)
- IPM = Indeks Pembangunan Manusia (Persen)
- TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)
- Pertumbuhan PDRB = Laju Pertumbuhan PDRB (Persen)
- β_0 = Konstanta
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien Regresi
- E = Variabel di luar model
- I = entitas ke-i

3.6 Pendekatan Model Regresi Data Panel

3.6.1 Pendekatan Regresi Data Panel dengan *Common Effect Model*

Penggabungan data time series dan data cross section tanpa memperhatikan perbedaan antar waktu dan perbedaan antar individu disebut pendekatan regresi data panel dengan Common Effect Model. Common Effect Model (CEM) mengasumsikan bahwa perilaku antar individu sama dalam berbagai kurun waktu dengan menggunakan model estimasi Ordinary Least

Squares (OLS). Berikut model persamaan regresi data panel dengan Common Effect Model (Widarjono, 2013).

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan :

- I = Banyaknya observasi (1, 2, ..., n)
- T = Banyaknya waktu (1, 2, ... , t)
- n x t = Banyaknya data panel
- E = residual

3.6.2 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Fixed Effect Model

Penggabungan data time series dan data cross section dengan memperhatikan perbedaan konstanta dalam model disebut pendekatan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM), model FEM menyatakan bahwa berbagai periode waktu dalam obyek observasi memiliki nilai konstanta dan koefisien regresi yang tetap dari waktu ke waktu. FEM memiliki dua (2) asumsi yaitu yang pertama bahwa slope bersifat konstan namun intersep bervariasi antar unit dan yang kedua slope konstan namun intersep bervariasi antar unit dan antar periode waktu. Perbedaan intersep dijelaskan pada variabel semu (variabel dummy) dalam model FEM dengan menggunakan metode Least Squares Dummy Variabel (LSDV). Berikut model persamaan regresi data panel dengan Fixed Effect Model asumsi slope regresi konstan namun intersep berbeda-beda antar unit (Sriyana, 2014).

$$Y_{it} = \beta_0 + \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (5)$$

Keterangan :

I = Banyaknya observasi (1, 2, ..., n)

T = Banyaknya waktu (1, 2, ... , t)

n x t = Banyaknya data panel

E = residual

3.6.3 Pendekatan Regresi Data Panel dengan Random Effect Model

Penggabungan data time series dan data cross section dengan mengasumsikan bahwa terdapat perbedaan intersep dan konstanta yang disebabkan oleh residual akibat dari perbedaan antar unit dan antar periode waktu yang terjadi secara acak (random) disebut pendekatan regresi data panel dengan Random Effect Model. Random Effect Model (REM) disebut dengan error componen model. REM memiliki dua (2) asumsi yaitu yang pertama intersep dan slope berbeda antar individu dan yang kedua intersep dan slope berbeda antar individu serta periode waktu. Model REM menggunakan metode Generalized Least Squares (GLS) yang telah mampu mengatasi masalah autokorelasi. Berikut model persamaan regresi data panel dengan Random Effect Model asumsi intersep dan slope berbeda antar individu (Sriyana, 2014).

$$Y_{it} = \beta_{0i} \sum_{i=1}^m \sum_{k=1}^n \beta_k X_{kit} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan :

I = Banyaknya observasi (1, 2, ..., n)

T = Banyaknya waktu (1, 2, ... , t)

n x t = Banyaknya data panel

e = residual

3.7 Pemilihan teknik estimasi regresi Data Panel

Pemilihan teknik estimasi regresi Data Panel dapat dilakukan dengan tiga uji untuk mendapatkan model yang tepat untuk regresi Data Panel. Berikut tiga uji pemilihan teknik estimasi regresi Data Panel (Sriyana, 2014).

3.7.1 Uji Chow (Uji F)

Uji Chow (Uji F) digunakan untuk pemilihan teknik regresi data panel dengan model CEM yang memiliki asumsi bahwa slope dan intersep tetap antar individu dan waktu dan model FEM yang memiliki asumsi bahwa terdapat perbedaan intersep dengan menambahkan variabel dummy. Uji Chow (Uji F) dihitung menggunakan nilai Sum Of Squares (RRS) dari CEM dan FEM. Berikut formulasi untuk mendapatkan nilai F.

$$F \text{ hitung} = \frac{\frac{(RSS1-RSS2)}{i-1}}{\frac{(RSS2)}{(it-i-k)}} \dots\dots\dots(7)$$

Keterangan :

- RSS1 = Residual sum squares dari Common Effect Model
- RSS2 = Residual sum squares dari Fixed Effect Model
- i = jumlah individu
- t = jumlah periode waktu
- k = banyaknya parameter dalam Fixed Effect Model

Berikut pernyataan hipotesis untuk Uji F.

H_0 : Tidak terdapat perbedaan dalam intersep (Common Effect Model yang tepat)

H_a : Terdapat perbedaan dalam intersep (Fixed Effect Model yang tepat)

Perhitungan Uji Chow (Uji F) menggunakan F hitung dibandingkan dengan nilai F tabel. Nilai F tabel didapatkan dengan df sebesar m untuk numerator dan n-k untuk denominator. Perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel, apabila nilai F hitung lebih besar ($>$) dibandingkan F tabel maka H_0 ditolak artinya terdapat perbedaan dalam intersep sehingga model yang tepat digunakan adalah FEM. Apabila nilai F hitung lebih kecil ($<$) dibandingkan F tabel maka H_0 diterima artinya tidak terdapat perbedaan dalam intersep sehingga model yang tepat digunakan adalah CEM. Penentuan Uji Chow (Uji F) juga dapat ditentukan dengan metode perbandingan probabilitas dengan tingkat kesalahan (α). Apabila nilai Probabilitas yang didapatkan kurang dari ($<$) α maka H_0 ditolak artinya model yang tepat digunakan adalah FEM dan sebaliknya, apabila nilai Probabilitas yang didapatkan lebih dari ($>$) α maka H_0 diterima artinya model yang tepat digunakan adalah CEM (Sriyana, 2014).

3.7.2 Uji Lagrange Multiplier (LM)

Uji LM digunakan untuk pemilihan teknik regresi data panel dengan model *Random Effect Model* (REM) dan model *Common Effect Model* (CEM). Berikut formulasi untuk mendapatkan nilai LM.

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \varepsilon_{it}}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \varepsilon_{it}^2} \right]^2 \dots\dots\dots(8)$$

$$LM = \frac{nT}{2(T-1)} \left[\frac{\sum_{i=1}^n (T - \overline{\varepsilon_{it}})^2}{\sum_{i=1}^n \sum_{t=1}^T \varepsilon_{it}^2} \right] \dots\dots\dots(9)$$

Keterangan :

T = jumlah periode waktu

E = residual dari *Common Effect Model*

Berikut pernyataan hipotesis untuk Uji LM

H₀ : Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) lebih baik daripada metode *Generalized Least Square* (GLS) (*Common Effect Model* yang tepat)

H_a : Metode *Generalized Least Square* (GLS) lebih baik daripada *Ordinary Least Squares* (OLS) (*Random Effect Model* yang tepat)

Perhitungan Uji LM menggunakan nilai LM dibandingkan dengan nilai X tabel. Nilai X tabel didapatkan dengan df sebesar jumlah variabel independen yang digunakan dalam penelitian. Perbandingan nilai LM dengan nilai X tabel, apabila nilai LM lebih besar (>) dibandingkan X tabel maka H₀ ditolak artinya metode GLS lebih baik daripada OLS (*Random Effect Model* yang tepat). Apabila nilai LM lebih kecil (<) dibandingkan X tabel maka H₀ diterima artinya Metode OLS lebih baik daripada metode GLS (*Common Effect Model* yang tepat). Penentuan Uji LM juga dapat ditentukan dengan metode perbandingan probabilitas dengan tingkat kesalahan (alpha). Apabila nilai Probabilitas yang didapatkan kurang dari (<) alpha maka H₀ ditolak artinya model yang tepat digunakan adalah REM dan sebaliknya, apabila nilai Probabilitas yang didapatkan lebih dari

(>) alpha maka H_0 diterima artinya model yang tepat digunakan adalah CEM (Sriyana, 2014).

3.7.3 Uji Hausman

Uji hausman digunakan untuk pemilihan teknik regresi data panel dengan model *Fixed Effect Model* (FEM) dengan metode OLS dan model *Random Effect Model* (REM) dengan metode GLS. Berikut formulasi untuk mendapatkan nilai hausman (W hitung).

$$W = X^2[K] = [\hat{\beta} \hat{\beta}_{GLS}] \Sigma^{-1} [\hat{\beta} - \hat{\beta}_{GLS}] \dots \dots \dots (10)$$

Berikut pernyataan hipotesis untuk Uji Hausman.

H_0 : Metode *Generalized Least Square* (GLS) lebih baik daripada metode *Ordinary Least Squares* (OLS) (Random Effect Model yang tepat)

H_a : Metode *Ordinary Least Squares* (OLS) lebih baik daripada *Generalized Least Square* (GLS) (Fixed Effect Model yang tepat)

Perhitungan Uji Hausman menggunakan nilai Hausman (W hitung) dibandingkan dengan nilai kritis chi-squares. Apabila nilai Hausman (W hitung) lebih besar (>) dibandingkan nilai kritis chi-squares maka H_0 ditolak artinya metode OLS lebih baik daripada GLS (*Fixed Effect Model* yang tepat). Apabila nilai Hausman (W hitung) lebih kecil (<) dibandingkan nilai kritis chi-squares maka H_0 diterima artinya Metode GLS lebih baik daripada metode OLS (*Random Effect Model* yang tepat). Penentuan Uji LM juga dapat ditentukan dengan metode perbandingan probabilitas dengan tingkat kesalahan (alpha). Apabila nilai Probabilitas yang didapatkan kurang dari

(\leq) alpha maka H_0 ditolak artinya model yang tepat digunakan adalah FEM dan sebaliknya, apabila nilai Probabilitas yang didapatkan lebih dari ($>$) alpha maka H_0 diterima artinya model yang tepat digunakan adalah REM (Sriyana, 2014).

3.8 Uji Statistik

Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini berupa koefisien determinasi (R-square), uji parsial (Uji t) dan uji simultan (Uji F)

3.8.1 Koefisien Determinasi

Seberapa baik analisis di dalam model dapat di lihat dari nilai Koefisien determinasi, dimana besarnya nilai R-square menentukan proporsi variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen yang digunakan dalam model. Berikut formulasi untuk menentukan nilai R-square.

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} \dots \dots \dots (11)$$

$$R^2 = 1 - \frac{RSS}{TSS} \dots \dots \dots (12)$$

$$R^2 = 1 - \frac{(\sum \widehat{e^2})}{(\sum y^2 i)} \dots \dots \dots (13)$$

$$R^2 = 1 - \frac{(\sum \widehat{e^2})}{(\sum yi - \bar{y})^2} \dots \dots \dots (14)$$

3.8.2 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) dalam penelitian digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan asumsi variabel yang digunakan dalam model dianggap tetap. Berikut formulasi untuk menentukan nilai t hitung.

$$t = \frac{\widehat{\beta}_i}{se(\widehat{\beta}_i)} \dots \dots \dots (15)$$

Penentuan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial melalui nilai t dengan membandingkan nilai t hitung dengan t kritis. Nilai t kritis didapatkan melalui nilai degree of freedom (df) = n-k dan nilai alpha (α). Berikut pernyataan hipotesis untuk uji t.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

H_a = Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial

Apabila nilai t hitung lebih besar (>) daripada nilai t kritis maka menolak H_0 , hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Apabila nilai t hitung lebih kecil (<) daripada nilai t kritis maka gagal menolak H_0 , hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

Pengujian uji t juga dapat digunakan nilai probabilitas untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Apabila nilai probabilitas lebih kecil (<) daripada alpha (α) maka menolak H_0 , hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Apabila nilai probabilitas lebih besar (>) daripada alpha (α) maka gagal menolak H_0 ,

hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.

3.8.3 Uji simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) dalam penelitian digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut formulasi untuk menentukan nilai t hitung.

$$F = \frac{\frac{ESS}{n-k}}{\frac{ESS}{n-k}} = \frac{\frac{R^2}{k-1}}{\frac{1-R^2}{n-k}} \dots\dots\dots(16)$$

Penentuan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan melalui nilai F dengan membandingkan nilai F hitung dengan F kritis. Nilai F kritis didapatkan melalui nilai degree of freedom (df) numerator = k-1 dan nilai degree of freedom (df) = (n-k) dengan nilai alpha (α) Berikut pernyataan hipotesis untuk uji F.

H_0 = Tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

H_a = Terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan

Apabila nilai F hitung lebih besar (>) daripada nilai F kritis maka menolak H_0 , hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Apabila nilai F hitung lebih kecil (<) daripada nilai F kritis maka gagal menolak H_0 ,

hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Pengujian uji t juga dapat digunakan nilai probabilitas untuk menentukan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Apabila nilai probabilitas lebih kecil ($<$) daripada alpha (α) maka menolak H_0 , hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Apabila nilai probabilitas lebih besar ($>$) daripada alpha (α) maka gagal menolak H_0 , hal ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

BAB IV

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, akan menjelaskan mengenai pengaruh capaian dana keistimewaan (Capaian Danais), indeks pembangunan manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka (TPT) dan laju pertumbuhan produk regional domestik bruto (Pertumbuhan PDRB) terhadap kemiskinan di DIY. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan gabungan dari data *cross-section* dan data *time series* dari 5 Kabupaten/Kota di DIY selama periode waktu 2014-2023, sehingga total data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah 50 data. Analisis regresi data panel yang dilakukan yaitu dengan memilih metode yang tepat dari tiga metode yaitu metode *common effect*, metode *fixed effect* dan metode *random effect*. Ketiga metode ini akan diuji untuk mendapatkan model yang paling sesuai untuk menjelaskan hasil dari penelitian ini dengan menggunakan tiga uji yaitu Uji chow (Uji F), Uji LM dan Uji Hausman. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Eviews 12.

4.1 Deskriptif Data

Statistik deskriptif data dalam penelitian ini menguraikan rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah dari setiap variabel yang digunakan untuk Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut tabel statistik deskriptif pada penelitian ini.

Table IV.6 Statistik Deskriptif

Kabupaten/Kota	Statistik Deskriptif	Kemiskinan	Capaian Dana Keistimewaan	IPM	TPT	Pertumbuhan PDRB
Kota Yogyakarta	Mean	7,36	77,63	86,2	6,50	4,51
	Maximum	8,67	99,25	88,61	9,16	5,96
	Minimum	6,49	16,16	83,78	4,8	-2,42
Kabupaten Bantul	Mean	13,71	83,12	79,43	3,33	4,47
	Maximum	15,89	94,89	81,74	4,06	5,53
	Minimum	11,95	41,13	77,11	2,57	-1,65
Kabupaten Kulon Progo	Mean	18,53	92,09	73,64	2,82	5,73
	Maximum	20,64	99,08	75,82	3,72	13,49
	Minimum	15,64	66,01	70,68	1,49	-3,45
Kabupaten Gunungkidul	Mean	17,81	87,33	69,27	2,15	4,47
	Maximum	20,83	98,10	71,46	2,9	5,37
	Minimum	15,6	38,37	67,03	1,61	-0,68
Kabupaten Sleman	Mean	8,11	86,20	84,15	4,63	4,58
	Maximum	9,5	98,59	88,61	5,37	6,48
	Minimum	7,41	34,52	80,73	3,51	-3,91

Berdasarkan tabel statistik deskriptif di atas, Kota Yogyakarta memiliki rata-rata presentase kemiskinan sebesar 7,36% menunjukkan bahwa rata-rata presentase kemiskinan Kota Yogyakarta dalam periode waktu 2014-2023 berada pada angka 7,36%. Nilai maksimum kemiskinan Kota Yogyakarta berada pada tahun 2014 sebesar 8,67% dan nilai minimum pada tahun 2023 yakni 6,49% hal

ini menunjukkan adanya tren penurunan presentase kemiskinan di Kota Yogyakarta dari tahun 2014-2023. Presentase capaian Dana Keistimewaan Kota Yogyakarta memiliki rata-rata sebesar 77,63% menunjukkan bahwa rata-rata alokasi Dana Keistimewaan yang berhasil dimanfaatkan atau dicapai Kota Yogyakarta selama periode waktu 2014-2023 sebesar 77,63%. Nilai maksimum capaian dana keistimewaan Kota Yogyakarta berada pada tahun 2023 yakni sebesar 99,25% sementara nilai minimum capaian dana keistimewaan Kota Yogyakarta berada pada tahun 2014 yakni 16,17% hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada awal tahun disalurkannya Dana Keistimewaan sampai dengan tahun 2013. Tingkat IPM Kota Yogyakarta memiliki rata-rata sebesar 86,2 menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta memiliki kualitas hidup dan pembangunan manusia yang relatif baik. Nilai maksimum IPM Kota Yogyakarta berada pada tahun 2023 yakni sebesar 88,61 sementara nilai minimum IPM Kota Yogyakarta berada pada tahun 2014 yakni 83,73 dimana nilai minimum ini masih dalam kategori baik menurut standar nasional hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli Kota Yogyakarta cukup tinggi. TPT Kota Yogyakarta memiliki rata-rata sebesar 6,50%. Nilai maksimum TPT Kota Yogyakarta berada pada tahun 2020 yakni sebesar 9,16% dan nilai minimum TPT Kota Yogyakarta berada pada tahun 2019 yakni 4,8% nilai TPT Kota Yogyakarta ini cukup berfluktuasi dan puncaknya pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh adanya fenomena pandemi covid-19, namun TPT Kota Yogyakarta mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yakni 6,07%. Tingkat Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta memiliki rata-rata

sebesar 4,51%. Nilai maksimum Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta berada pada tahun 2019 yakni sebesar 5,96% sementara nilai minimum Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta berada pada tahun 2020 yakni -2,42%. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami fluktuasi yang tinggi, nilai minimum mencapai -2,42% berada saat adanya pandemi covid-19 namun pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami pemulihan pada tahun setelah pandemi meski tingkat pertumbuhan ekonomi belum kembali ke angka tertinggi sebelum terjadinya pandemi covid-19.

Kabupaten Bantul memiliki rata-rata presentase kemiskinan sebesar 13,71% menunjukkan bahwa rata-rata presentase kemiskinan Kabupaten Bantul dalam periode waktu 2014-2023 berada pada angka 13,71%. Nilai maksimum kemiskinan Kabupaten Bantul berada pada tahun 2014 sebesar 15,89% dan nilai minimum pada tahun 2023 yakni 11,95% hal ini menunjukkan adanya tren penurunan presentase kemiskinan di Kabupaten Bantul dari tahun 2014-2023. Presentase capaian Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul memiliki rata-rata sebesar 83,12% menunjukkan bahwa rata-rata alokasi Dana Keistimewaan yang berhasil dimanfaatkan atau dicapai Kabupaten Bantul selama periode waktu 2014-2023 sebesar 83,12%. Nilai maksimum capaian dana keistimewaan Kabupaten Bantul berada pada tahun 2015 yakni sebesar 94,90% sementara nilai minimum capaian dana keistimewaan Kabupaten Bantul berada pada tahun 2014 yakni 41,13%. Capaian Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul mengalami fluktuatif dengan capaian paling tinggi berada di tahun 2015, setelah tahun 2015 capaian Dana Keistimewaan Kabupaten Bantul mengalami penurunan namun

stabil di angka 90%. Tingkat IPM Kabupaten Bantul memiliki rata-rata sebesar 79,43 menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul memiliki kualitas hidup dan pembangunan manusia yang relatif baik. Nilai maksimum IPM Kabupaten Bantul berada pada tahun 2023 yakni sebesar 81,74 sementara nilai minimum IPM Kabupaten Bantul berada pada tahun 2014 yakni 77,11 hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan nilai IPM setiap tahunnya di Kabupaten Bantul hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perbaikan kualitas hidup masyarakat di setiap tahunnya. TPT Kabupaten Bantul memiliki rata-rata sebesar 3,33%. Nilai maksimum TPT Kabupaten Bantul berada pada tahun 2020 yakni sebesar 4,06% dan nilai minimum TPT Kabupaten Bantul berada pada tahun 2014 yakni 2,57% nilai TPT Kabupaten Bantul ini cukup stabil setiap tahunnya namun mengalami lonjakan yang tinggi pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19. Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul memiliki rata-rata sebesar 4,47%. Nilai maksimum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul berada pada tahun 2019 yakni sebesar 5,53% sementara nilai minimum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul berada pada tahun 2020 yakni -1,65%. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul mengalami penurunan yang drastis pada tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19 namun Kabupaten Bantul mengalami pemulihan pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya.

Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata presentase kemiskinan sebesar 18,53% menunjukkan bahwa rata-rata presentase kemiskinan Kabupaten Kulon Progo dalam periode waktu 2014-2023 berada pada angka 18,53%. Nilai maksimum kemiskinan Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2014 sebesar

20,64% dan nilai minimum pada tahun 2023 yakni 15,64% hal ini menunjukkan adanya tren penurunan presentase kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2014-2023. Presentase capaian Dana Keistimewaan Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata sebesar 92,09% menunjukkan bahwa rata-rata alokasi Dana Keistimewaan yang berhasil dimanfaatkan atau dicapai Kabupaten Kulon Progo selama periode waktu 2014-2023 sebesar 92,09%. Nilai maksimum capaian dana keistimewaan Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2023 yakni sebesar 99,08% sementara nilai minimum capaian dana keistimewaan Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2014 yakni 66,01% hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada awal tahun disalurkannya Dana Keistimewaan sampai dengan tahun 2013. Tingkat IPM Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata sebesar 73,64 menunjukkan bahwa Kabupaten Kulon Progo memiliki kualitas hidup dan pembangunan manusia yang relatif baik. Nilai maksimum IPM Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2023 yakni sebesar 75,82 sementara nilai minimum IPM Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2014 yakni 70,68 dimana nilai minimum ini masih dalam kategori baik menurut standar nasional hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli Kabupaten Kulon Progo cukup tinggi. TPT Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata sebesar 2,82%. Nilai maksimum TPT Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2020 yakni sebesar 3,72% dan nilai minimum TPT Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2019 yakni 1,49% nilai TPT Kabupaten Kulon Progo ini cukup berfluktuasi dan puncaknya pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh adanya fenomena pandemi covid-19, namun TPT

Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yakni 5,73%. Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo memiliki rata-rata sebesar 5,73%. Nilai maksimum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2019 yakni sebesar 13,49% sementara nilai minimum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo berada pada tahun 2020 yakni -3,45%. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kulon Progo mengalami fluktuasi yang tinggi, nilai minimum mencapai -2,42% berada saat adanya pandemi covid-19.

Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata presentase kemiskinan sebesar 17,81% menunjukkan bahwa rata-rata presentase kemiskinan Kabupaten Gunungkidul dalam periode waktu 2014-2023 berada pada angka 17,81%. Nilai maksimum kemiskinan Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2014 sebesar 20,83% dan nilai minimum pada tahun 2023 yakni 15,6% hal ini menunjukkan adanya tren penurunan presentase kemiskinan di Kabupaten Gunungkidul dari tahun 2014-2023. Presentase capaian Dana Keistimewaan Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata sebesar 87,33% menunjukkan bahwa rata-rata alokasi Dana Keistimewaan yang berhasil dimanfaatkan atau dicapai Kabupaten Gunungkidul selama periode waktu 2014-2023 sebesar 87,33%. Nilai maksimum capaian dana keistimewaan Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2023 yakni sebesar 98,10% sementara nilai minimum capaian dana keistimewaan Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2014 yakni 38,37% hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada awal tahun disalurkannya Dana Keistimewaan sampai dengan tahun 2013. Tingkat IPM

Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata sebesar 69,27 menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul memiliki kualitas hidup dan pembangunan manusia yang relatif baik. Nilai maksimum IPM Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2023 yakni sebesar 71,46 sementara nilai minimum IPM Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2014 yakni 67,03 dimana nilai minimum ini masih dalam kategori baik menurut standar nasional hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli Kabupaten Gunungkidul cukup tinggi. TPT Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata sebesar 2,15%. Nilai maksimum TPT Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2020 yakni sebesar 2,9% dan nilai minimum TPT Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2019 yakni 1,61% nilai TPT Kabupaten Gunungkidul ini cukup berfluktuasi dan puncaknya pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh adanya fenomena pandemi covid-19, namun TPT Kabupaten Gunungkidul mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yakni 6,07%. Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul memiliki rata-rata sebesar 4,51%. Nilai maksimum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2019 yakni sebesar 5,96% sementara nilai minimum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Gunungkidul berada pada tahun 2020 yakni -2,42%. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul mengalami fluktuasi yang tinggi, nilai minimum mencapai -2,42% berada saat adanya pandemi covid-19.

Kabupaten Sleman memiliki rata-rata presentase kemiskinan sebesar 7,36% menunjukkan bahwa rata-rata presentase kemiskinan Kabupaten Sleman dalam periode waktu 2014-2023 berada pada angka 7,36%. Nilai maksimum

kemiskinan Kabupaten Sleman berada pada tahun 2014 sebesar 8,67% dan nilai minimum pada tahun 2023 yakni 6,49% hal ini menunjukkan adanya tren penurunan presentase kemiskinan di Kabupaten Sleman dari tahun 2014-2023. Presentase capaian Dana Keistimewaan Kabupaten Sleman memiliki rata-rata sebesar 77,63% menunjukkan bahwa rata-rata alokasi Dana Keistimewaan yang berhasil dimanfaatkan atau dicapai Kabupaten Sleman selama periode waktu 2014-2023 sebesar 77,63%. Nilai maksimum capaian dana keistimewaan Kabupaten Sleman berada pada tahun 2023 yakni sebesar 99,25% sementara nilai minimum capaian dana keistimewaan Kabupaten Sleman berada pada tahun 2014 yakni 16,17% hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan pada awal tahun disalurkan Dana Keistimewaan sampai dengan tahun 2013. Tingkat IPM Kabupaten Sleman memiliki rata-rata sebesar 86,2 menunjukkan bahwa Kabupaten Sleman memiliki kualitas hidup dan pembangunan manusia yang relatif baik. Nilai maksimum IPM Kabupaten Sleman berada pada tahun 2023 yakni sebesar 88,61 sementara nilai minimum IPM Kabupaten Sleman berada pada tahun 2014 yakni 83,73 dimana nilai minimum ini masih dalam kategori baik menurut standar nasional hal ini menunjukkan bahwa kualitas pendidikan, kesehatan dan daya beli Kabupaten Sleman cukup tinggi. TPT Kabupaten Sleman memiliki rata-rata sebesar 6,50%. Nilai maksimum TPT Kabupaten Sleman berada pada tahun 2020 yakni sebesar 9,16% dan nilai minimum TPT Kabupaten Sleman berada pada tahun 2019 yakni 4,8% nilai TPT Kabupaten Sleman ini cukup berfluktuasi dan puncaknya pada tahun 2020 hal ini disebabkan oleh adanya fenomena pandemi covid-19, namun

TPT Kabupaten Sleman mengalami penurunan kembali pada tahun 2023 yakni 6,07%. Tingkat Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman memiliki rata-rata sebesar 4,51%. Nilai maksimum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman berada pada tahun 2019 yakni sebesar 5,96% sementara nilai minimum Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sleman berada pada tahun 2020 yakni -2,42%. Kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi yang tinggi, nilai minimum mencapai -2,42% berada saat adanya pandemi covid-19.

4.2 Hasil Analisis Penelitian

4.2.1 Hasil regresi data panel *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*

Tabel IV. 7 Hasil regresi data Panel *Common Effect Model*, *Fixed Effect Model* dan *Random Effect Model*

Variabel Independen	<i>Common Effect Model</i>		<i>Fixed Effect Model</i>		<i>Random Effect Model</i>	
	Koefisien	Probabilitas	Koefisien	Probabilitas	Koefisien	Probabilitas
C	63.93	0.00***	49.03	0.00***	63.93	0.00***
Capaian Danais	0.01	0.35	-0.00	0.36	0.01	0.08*
IPM	-0.65	0.00***	-0.45	0.00***	-0.65	0.00***
TPT	-0.17	0.48	0.20	0.26	-0.17	0.18
Pertumbuhan PDRB	0.01	0.84	-0.00	0.86	0.01	0.71
R-Squared	0.88		0.97		0.88	
Prob(F-statistic)	0.00		0.00		0.00	

Catatan : * = signifikan pada alpha 10% ; ** = signifikan pada alpha 5% dan *** = signifikan pada alpha 1%

4.2.2 Penentuan model regresi data panel yang sesuai

Penelitian ini menggunakan nilai probabilitas (p-value) untuk menentukan model regresi data panel yang sesuai. Jika nilai Probabilitas < alpha (0.01) maka H_0 ditolak dan sebaliknya apabila nilai Probabilitas > alpha (0.01) maka H_0 diterima.

4.2.2.1 Uji Chow

Penentuan model regresi data panel dengan Uji Chow untuk memilih antara *Common Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Berikut hasil estimasi Uji Chow dengan Eviews 12.

Tabel IV.8 Hasil uji chow

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Fixed_Effect
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	30.889384	(4,41)	0.0000
Cross-section Chi-square	69.484411	4	0.0000

H_0 : *Common Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Didapatkan nilai Prob. 0.0000 < α (0.01) maka menolak H_0 , artinya model regresi data panel yang tepat yaitu *Fixed Effect Model*.

4.2.2.2 Uji Hausman

Penentuan model regresi data panel dengan Uji Hausman untuk memilih antara *Random Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*. Berikut hasil estimasi Uji Hausman dengan Eviews 12.

Tabel IV.9 Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Random_Effect

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
cross-section random	123.557537	4	0.0000

Ho : *Random Effect Model*

Ha : *Fixed Effect Model*

Didapatkan nilai Prob. 0.0000 < α (0.01) maka menolak Ho. Artinya model regresi data panel yang tepat yaitu *Fixed Effect Model*.

4.2.3 Uji statistik dengan *Fixed Effect Model*

$$Kemiskinan_{it} = \beta_0 + \beta_1 Capaian_Danais_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \beta_3 TPT_{it} + \beta_4 PertumbuhanPDRB_{it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (3)$$

4.2.3.1 Hasil regresi metode data panel dengan *Fixed Effect Model*

Berdasarkan uji pemilihan metode regresi data panel yang sesuai yaitu Uji Chow dan Uji Hausman didapatkan model yang sesuai yaitu *Fixed Effect Model*. Berikut hasil estimasi *Fixed Effect Model* dengan Eviews 12.

Tabel IV.10 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* dengan Eviews 12

Variabel Dependen : KEMISKINAN				
Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	49.03	6.68	7.33	0.00***
CAPAIAN_DAIS	-0.00	0.00	-0.90	0.36
IPM	-0.45	0.08	-5.11	0.00***
TPT	0.20	0.17	1.13	0.26
PERTUMBUHAN_PDRB	-0.00	0.05	-0.16	0.86
R-squared	0.97	Mean dependent var		13.10
Adjusted R-squared	0.96	S.D. dependent var		4.89

F-statistik	170.18	Durbin-Watson stat	0.83
Prob(F-statistik)	0.00		

Catatan : *** = signifikan pada alpha 1%.

Pada hasil penelitian di atas merupakan hasil penelitian dari data panel yang bersifat linear, dimana bahwa model data panel linear ini memiliki asumsi bahwa perubahan variabel independen dan perubahan variabel dependen akan menghasilkan perubahan proporsional yang sama namun dalam praktiknya atau dalam dunia nyata terdapat fenomena *diminishing returns*, *threshold effect* dan *non-linear growth* sering terjadi yang mengakibatkan hubungan antar variabel tidak linear sehingga hasil dalam penelitian ini menggunakan Metode Regresi Data Panel Non-Linear Logaritma untuk meningkatkan kualitas prediksi serta pengukuran, dimana model logaritma ini dapat menangkap pola-pola fluktuasi yang tidak simetris dalam data panel dan memungkinkan menghasilkan prediksi yang lebih akurat untuk menghasilkan hubungan antar variabel yang diteliti (O'brien dan Silcox, 2024).

Tabel IV.11 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* dengan Eviews 12

Variabel Dependen : LOG(KEMISKINAN)				
Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	13.85	2.04	6.79	0.00***
LOG(CAPAIAN_DAIS)	-0.05	0.02	-1.95	0.05*
LOG(IPM)	-2.56	0.48	-5.31	0.00***
TPT	0.01	0.01	1.34	0.18
PERTUMBUHAN_PDRB	-0.00	0.00	-0.21	0.83
R-squared	0.98	Mean dependent var		2.49
Adjusted R-squared	0.98	S.D. dependent var		0.40
F-statistik	315.35	Durbin-Watson stat		1.36
Prob(F-statistik)	0.00			

Catatan : *** = signifikan pada alpha 1%, * = signifikan pada alpha 10%

4.2.3.2 Uji Autokorelasi

Autokorelasi terjadi ketika residual dari sebuah model regresi berkorelasi satu sama lain. Hal ini dapat terjadi ketika data dikumpulkan dari waktu ke waktu, dan observasi tidak independen. Masalah autokorelasi dapat menyebabkan estimasi yang tidak akurat dari koefisien regresi dan kesalahan standar. Uji Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan nilai Durbin-Watson statistik yang dibandingkan dengan nilai Durbin-Watson kritis (DW kritis). Berdasarkan tabel Durbin Watson kritis dengan alpha 0.05 ; jumlah observasi 50 data dan jumlah variabel independen 4 variabel yaitu didapatkan nilai $dL = 1.37$ dan $dU = 1.72$ sementara berdasarkan hasil olah data menggunakan Eviews 12 didapatkan nilai Durbin-Watson statistik (DW statistik) sebesar 1.36. Didapatkan nilai DW statistik $1.36 < dL 1.37$ sehingga terdapat autokorelasi, sehingga penelitian ini menggunakan *coeficient covariance method cross-section weight* (PSCE) untuk mengatasi masalah autokorelasi dalam model penelitian.

4.2.3.3 Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi (R-squared) dalam penelitian ini sebesar 0.9840 atau 98,40%. Artinya variasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dana Keistimewaan, IPM, TPT dan Pertumbuhan PDRB mampu menjelaskan variabel dependen atau variabel kemiskinan sebesar 98,40% sementara 1,6% variabel kemiskinan dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.2.3.4 Uji parsial (Uji t)

1. Uji parsial pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan di DIY

Nilai koefisien dan probabilitas Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan di DIY dalam penelitian ini yaitu -0.052816 dan 0.0569. Probabilitas Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan $0.0569 < \alpha 0.10$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan menolak H_0 yaitu Dana Keistimewaan memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY, dengan nilai koefisien sebesar -0.05 artinya ketika Dana Keistimewaan meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.05% dan sebaliknya ketika Dana Keistimewaan menurun sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0.05%.

2. Uji parsial pengaruh IPM terhadap Kemiskinan di DIY

Nilai koefisien dan probabilitas IPM terhadap Kemiskinan di DIY dalam penelitian ini yaitu -2.563768 dan 0.00. Probabilitas IPM terhadap Kemiskinan $0.00 < \alpha 0.01$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan menolak H_0 yaitu IPM memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY dengan nilai koefisien sebesar -2.563768 artinya ketika IPM meningkat sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 2.56% dan sebaliknya ketika IPM menurun sebesar 1% maka kemiskinan akan mengalami peningkatan sebesar 2.56%.

3. Uji parsial pengaruh TPT terhadap Kemiskinan di DIY

Nilai koefisien dan probabilitas TPT terhadap Kemiskinan di DIY dalam penelitian ini yaitu 0.014048 dan 0.1867. Probabilitas TPT terhadap

Kemiskinan $0.1867 > \alpha 0.10$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan gagal menolak H_0 yaitu TPT tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan Kemiskinan di DIY.

4. Uji parsial pengaruh Pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di DIY

Nilai koefisien dan probabilitas pertumbuhan PDRB terhadap Kemiskinan di DIY dalam penelitian ini yaitu -0.000722 dan 0.8346 . Probabilitas pertumbuhan PDRB terhadap kemiskinan yaitu $0.8346 > \alpha 0.10$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan menolak H_0 yaitu pertumbuhan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY.

4.1.3.5 Uji simultan (Uji F)

Uji simultan (uji F) untuk melihat pengaruh Dana Keistimewaan, IPM, TPT dan Pertumbuhan PDRB terhadap penurunan kemiskinan di DIY. Nilai probabilitas nilai F (Prob. F-statistik) yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu $0.00 < \alpha 0.01$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan menolak H_0 yaitu secara bersama-sama Dana Keistimewaan, IPM, TPT dan Pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY.

Untuk meningkatkan akurasi dalam memprediksi hubungan variabel independen terhadap variabel dependen yang memiliki pola atau hubungan variabel yang berubah dari waktu ke waktu maka penelitian ini menambahkan hasil penelitian menggunakan Model Regresi Adaptive dimana Model Regresi Adaptive merupakan metode yang menggunakan proses adaptasi serta penyesuaian dalam model regresi dengan menggunakan $t-1$ sebagai variabel

independen (Sriyana, 2018). Berikut hasil regresi menggunakan metode Model Regresi Adaptive yang diolah menggunakan Eviews 12.

Tabel IV.12 Hasil Estimasi *Fixed Effect Model* dengan Model Regresi Adaptive

Variabel Dependen : LOG(KEMISKINAN)				
Variabel Independen	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Probabilitas
C	14.11	2.01	7.01	0.00***
LOG(CAPAIAN_DAIS(-1))	0.00	0.02	0.39	0.69
LOG(IPM(-1))	-2.66	0.47	-5.62	0.00***
TPT (-1)	-0.00	0.00	-0.72	0.47
PERTUMBUHAN_PDRB (-1)	-0.00	0.00	-2.68	0.01**
R-squared	0.98	Mean dependent var		2.48
Adjusted R-squared	0.98	S.D. dependent var		0.39
F-statistik	381.49	Durbin-Watson stat		1.12
Prob(F-statistik)	0.00			

Catatan : *** = signifikan pada alpha 1%, ** = signifikan pada alpha 5%

4.1.3.6 Uji Autokorelasi Adaptive Model

Pada metode regresi data panel dengan model regresi adaptive ini menggunakan variabel lag dalam model regresi sehingga diperlukan uji autokorelasi yang dapat mendeteksi autokorelasi dalam model regresi yang mengandung variabel lag yaitu menggunakan Uji Durbin h. Berikut formulasi perhitungan untuk mendapatkan Durbin h.

$$h = \left(1 - \frac{1}{2}DW\right) \cdot \sqrt{\frac{n}{1 - n \cdot \text{Var}(\hat{\beta})}}$$

Dimana :

DW = Nilai dari Durbin-Watson

n = Jumlah Observasi

$Var(\widehat{\beta})$ = Varian dari koefisien variabel lag

Melalui formulasi rumus tersebut dengan nilai Durbin-Watson statistik 1.12, jumlah observasi 50 data dan varian dari variabel lag 15,76 maka didapatkan nilai Durbin h sebesar $6,86 > 1$ maka terdapat autokorelasi dalam model regresi penelitian ini, sehingga penelitian ini menggunakan *coeficient covariance method cross-section weight* (PSCE) untuk mengatasi masalah autokorelasi dalam model penelitian.

4.1.3.7 Koefisien Determinasi Adaptive Model

Nilai koefisien determinasi (R-squared) dalam penelitian ini dengan menggunakan Model Regresi Adaptive sebesar 0.9883 atau 98,83%. Artinya variasi dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dana Keistimewaan, IPM, TPT dan Pertumbuhan PDRB mampu menjelaskan variabel dependen atau variabel kemiskinan sebesar 98,83% sementara 1,17% variabel kemiskinan dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.1.3.8 Uji parsial (Uji t) Adaptive Model

1. Uji parsial pengaruh Dana Keistimewaan t-1 terhadap Kemiskinan di DIY

Nilai koefisien dan probabilitas Dana Keistimewaan t-1 terhadap Kemiskinan di DIY dalam penelitian ini yaitu 0.008949 dan 0.6925. Probabilitas Dana Keistimewaan t-1 terhadap kemiskinan yaitu $0.6925 > \alpha 0.10$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan menolak H_0 yaitu Dana Keistimewaan t-1 tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY tahun berjalan.

2. Uji parsial pengaruh IPM t-1 terhadap Kemiskinan di DIY

Nilai koefisien dan probabilitas IPM terhadap Kemiskinan di DIY dalam penelitian ini yaitu -2.665950 dan 0.0000. Probabilitas IPM t-1 terhadap Kemiskinan $0.00 < \alpha 0.01$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan menolak H_0 yaitu IPM t-1 memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY tahun berjalan dengan nilai koefisien sebesar -2.665950 artinya ketika IPM meningkat sebesar 1% maka kemiskinan tahun berjalan akan mengalami penurunan sebesar 2.66% dan sebaliknya ketika IPM menurun sebesar 1% maka kemiskinan tahun berjalan akan mengalami peningkatan sebesar 2.66%.

3. Uji parsial pengaruh TPT t-1 terhadap Kemiskinan di DIY

Nilai koefisien dan probabilitas TPT t-1 terhadap Kemiskinan di DIY dalam penelitian ini yaitu -0.006427 dan 0.4761. Probabilitas TPT t-1 terhadap Kemiskinan $0.1867 > \alpha 0.10$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan gagal menolak H_0 yaitu TPT t-1 tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan Kemiskinan di DIY tahun berjalan.

4. Uji parsial pengaruh Pertumbuhan PDRB t-1 terhadap Kemiskinan di DIY

Nilai koefisien dan probabilitas Pertumbuhan PDRB t-1 terhadap Kemiskinan di DIY dalam penelitian ini yaitu -0.008210 dan 0.0110. probabilitas Pertumbuhan PDRB t-1 terhadap Kemiskinan $0.0110 < \alpha 0.05$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan menolak H_0 yaitu Pertumbuhan PDRB t-1 memiliki pengaruh terhadap Kemiskinan di DIY tahun berjalan dengan nilai koefisien sebesar 0.008210 artinya ketika Pertumbuhan PDRB t-1 mengalami peningkatan sebesar 1% maka

kemiskinan di DIY tahun berjalan akan mengalami penurunan sebesar 0.008210 dan sebaliknya ketika Pertumbuhan PDRB t-1 mengalami penurunan sebesar 1% maka kemiskinan di DIY tahun berjalan akan mengalami peningkatan sebesar 0.008210.

4.1.3.9 Uji simultan (Uji F) Adaptive Model

Uji simultan (uji F) untuk melihat pengaruh Dana Keistimewaan t-1 , IPM t-1 , TPT t-1 dan Pertumbuhan PDRB t-1 terhadap penurunan kemiskinan di DIY tahun berjalan. Nilai probabilitas nilai F (Prob. F-statistik) yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu $0.00 < \alpha 0.01$ sehingga secara statistik hasil ini menunjukkan menolak H_0 yaitu secara bersama-sama Dana Keistimewaan, IPM, TPT dan Pertumbuhan PDRB memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY.

4.2 Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini membahas mengenai model terbaik yang telah didapatkan dari uji regresi data panel yaitu *Fixed Effect Model* dengan Metode Regresi Data Panel Statis dan Metode Regresi Data Panel Adaptive.

4.2.1 Dana Keistimewaan terhadap penurunan Kemiskinan di DIY

Berdasarkan hasil metode regresi data panel statis Dana Keistimewaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap penurunan Kemiskinan di DIY sementara hasil dari metode regresi data panel adaptive menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan t-1 tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan Kemiskinan di tahun berjalan. Perencanaan Dana Keistimewaan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana

Keistimewaan dilaksanakan t+2 yaitu kebutuhan pendanaan urusan keistimewaan melalui usulan program dan kegiatan keistimewaan disampaikan t+2 yaitu tahun anggaran berjalan ditambah dua tahun yang akan datang sehingga pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun t telah direncanakan t-2, dalam proses pelaksanaannya usulan program kegiatan Dana Keistimewaan tahun t masih terus mengalami perubahan serta penyesuaian sehingga dalam berjalannya waktu perencanaan usulan Dana Keistimewaan masih dapat berubah hingga pelaksanaannya. Perubahan penetapan program kegiatan Dana Keistimewaan pada tahun t juga dapat disebabkan oleh pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun t-1 dimana pelaksanaan tahun n merupakan hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun t-1. Alokasi Dana Keistimewaan t-1 akan dievaluasi melalui proses monitoring dan evaluasi Dana Keistimewaan yang akan menjadi dasar alokasi Dana Keistimewaan pada tahun n sehingga capaian Dana Keistimewaan t-1 belum memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan karena capaian Dana Keistimewaan tahun n merupakan capaian dari alokasi anggaran yang telah di evaluasi pada t-1 dan baru berdampak terhadap penurunan kemiskinan pada tahun n.

Dana Keistimewaan disalurkan oleh Pemerintah Pusat ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dimulai pada tahun 2013 yang dikelola oleh Bappeda DIY sampai dengan tahun 2018. Pada tahun 2018 terbentuk lembaga pemerintahan khusus pengelola Dana Keistimewaan yang disebut dengan *Paniradya Kaistimewan* DIY. Komitmen Pemerintah DIY dalam mengelola Dana Keistimewaan tertuang dalam Grand Design Keistimewaan tahun 2021-2042

bahwa sasaran pembangunan daerah DIY yaitu Pertumbuhan Ekonomi ; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ; Indeks Gini ; Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan yang didukung oleh Program Urusan Keistimewaan sehingga penurunan kemiskinan ini menjadi komitmen bagi Pemerintah Daerah DIY untuk mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat di DIY. Komitmen ini telah dijalankan oleh Pemerintah Daerah DIY melalui pelaksanaan program kegiatan keistimewaan. Berdasarkan kebijakan strategis Gubernur DIY untuk meningkatkan pemberdayaan serta produktivitas masyarakat melalui kegiatan menggali dan mengelola potensi desa/kalurahan yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara keseluruhan, melalui kebijakan strategis Gubernur DIY ini proses pembangunan, proses pemberdayaan dan proses penguatan SDM diutamakan kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Kegiatan program kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat melalui Kebijakan Strategis Gubernur DIY yang meliputi :

- a. Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
- b. Rintisan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya
- c. Balai Budaya
- d. Arsitektur Yogyakarta
- e. Cagar Budaya
- f. Warisan Budaya tak Benda
- g. Karangkopek
- h. Pengelolaan pemanfaatan ruang pada satuan ruang strategis

- i. Penerapan administrasi tanah desa
- j. Penerapan tata nilai semangat keyogyakartaan
- k. Budaya maritim

Salah satu kebijakan strategis Gubernur diatas yaitu Desa/Kalurahan Mandiri Budaya. Dalam Desa/Kalurahan Mandiri Budaya memiliki empat (4) pilar yaitu Desa Budaya, Desa Preneur, Desa Prima dan Desa Wisata. BKK Desa/Kalurahan Mandiri Budaya ini mulai disalurkan pada tahun 2021 melalui Dana Keistimewaan. Pada tahun 2021 terdapat 10 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dengan rincian 1 di Kabupaten Bantul, 2 di Kabupaten Gunungkidul, 2 di Kabupaten Kulon Progo dan 5 di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2022 terdapat 18 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dengan rincian 2 di Kabupaten Bantul, 4 di Kabupaten Gunungkidul, 7 di Kabupaten Kulon Progo dan 5 di Kabupaten Sleman. Pada tahun 2023 terdapat 25 Desa/Kalurahan Mandiri Budaya dengan rincian 5 di Kabupaten Bantul, 6 di Kabupaten Gunungkidul, 7 di Kabupaten Kulon Progo dan 7 di Kabupaten Sleman.

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan program kegiatan keistimewaan untuk membantu penurunan angka kemiskinan di DIY melalui aktivitas-aktivitas yang mendukung penurunan kemiskinan di DIY. Aktivitas penurunan kemiskinan merupakan aktivitas-aktivitas pelaksanaan Dana Keistimewaan Tahun Anggaran 2023 melalui Urusan Keistimewaan Kebudayaan, Urusan Keistimewaan Tata Ruang dan Urusan Keistimewaan Pertanahan. Aktivitas-aktivitas tersebut termuat dalam sub kegiatan keistimewaan dimana masing-masing sub kegiatan memiliki dampak yang signifikan terhadap penurunan

kemiskinan yaitu melalui pemberdayaan ekonomi, pendidikan serta pembangunan dalam masyarakat.

Sub kegiatan pengembangan kewirausahaan desa aktivitas yang dilaksanakan berfokus kepada peningkatan kapasitas UMKM di kalurahan, pelaksanaan sertifikasi halal, ekspor produk UMKM, pelatihan kewirausahaan serta promosi produk lokal melalui pameran serta kegiatan pemasaran untuk mendukung UMKM yang ada di DIY, aktivitas dalam sub kegiatan ini membantu penurunan kemiskinan melalui peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat sistem ekonomi lokal dan membuka peluang kerja baru dalam sektor informal. Penelitian dari Danson dkk (2021) menyatakan bahwa kebijakan penurunan tingkat kemiskinan melalui kebijakan peningkatan wirausaha dapat mengalihkan resiko serta tanggungjawab sosial pekerjaan dari negara dan pemberi kerja ke individu-individu yang tidak mampu menanggung, sehingga melalui program kegiatan Dana Keistimewaan meningkatkan UMKM dapat meningkatkan kemandirian individu dalam peningkatan pendapatan yang berdampak kepada penurunan kemiskinan.

Sub kegiatan pengembangan ekonomi perempuan dengan aktivitas kegiatan yang menyasar kepada kelompok perempuan melalui pembinaan kelompok ekonomi perempuan serta implementasi prima setara yang dapat memperkuat peran perempuan dalam ekonomi lokal, aktivitas dalam sub kegiatan ini membantu penurunan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan secara ekonomi dengan memberikan kelompok perempuan akses

lebih besar terhadap penggunaan sumber daya dan dapat membantu mengurangi ketergantungan finansial.

Sub kegiatan pengembangan lumbung mataraman melalui aktivitas pengembangan lumbung pangan di kalurahan, pengembangan pertanian serta penguatan cadangan pangan serta potensi pangan lokal yang mendukung peningkatan ketahanan pangan lokal serta mendukung petani lokal, aktivitas dalam sub kegiatan ini dapat membantu penurunan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas pertanian lokal serta menciptakan lapangan kerja di sektor pertanian.

Sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya melalui aktivitas pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembangunan karakter anggaran kerja melalui padat karya untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja, memperkuat budaya kerja dan meningkatkan produktivitas, sub kegiatan ini dapat membantu pengurangan angka kemiskinan melalui peningkatan keterampilan angkatan kerja serta menciptakan lebih banyak kesempatan kerja melalui program padat karya.

Sub kegiatan pengembangan desa budaya dengan aktivitas pemberdayaan desa melalui event kesenian, aktivitas ini dapat mendukung penurunan kemiskinan melalui pergerakan di sektor pariwisata serta budaya sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat khususnya di kalurahan melalui kegiatan budaya.

Sub kegiatan pengembangan muatan lokal melalui aktivitas penyaluran beasiswa serta program manajemen usaha siswa dan pelatihan berbasis budaya

yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran budaya di kalangan generasi muda, aktivitas ini mendukung penurunan kemiskinan melalui peningkatan keterampilan generasi muda serta menyiapkan generasi muda untuk terjun ke dunia kerja dengan keterampilan yang relevan. Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan (BKK Kalurahan) melalui Urusan Keistimewaan Kebudayaan, Urusan Keistimewaan Tata Ruang dan Urusan Keistimewaan Pertanahan dapat membantu penurunan kemiskinan melalui peningkatan infrastruktur lokal dan membantu mendukung ekonomi lokal serta menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek-proyek yang dilaksanakan oleh kalurahan. Sehingga melalui aktivitas-aktivitas yang termuat dalam sub kegiatan keistimewaan ini terhubung langsung dengan penurunan kemiskinan di DIY melalui pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan serta penguatan kapasitas masyarakat yang memberikan akses kepada masyarakat khususnya di wilayah pedesaan untuk memiliki produktivitas yang tinggi, meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan kepada sektor formal.

Dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, Dana Keistimewaan juga disalurkan untuk hibah melalui urusan keistimewaan kebudayaan berupa peralatan produksi untuk membantu peningkatan produksi UMKM di DIY serta Integrasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dengan Gaya Khas Tradisional Jawa dan Konstruksi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dengan Gaya Khas Tradisional Jawa untuk membantu masyarakat miskin yang masih memiliki tempat tinggal yang kurang layak di DIY.

Bantuan hibah Dana Keistimewaan melalui urusan keistimewaan kebudayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan diarahkan untuk mendukung peningkatan ekonomi masyarakat melalui dukungan untuk usaha kecil dan mikro. Sebagian besar bantuan diberikan kepada kelompok-kelompok usaha kecil dalam bentuk peralatan produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang berpotensi dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan penerima bantuan. Bantuan hibah ini tersebar di masing-masing Kabupaten/Kota yang ada di DIY, hal ini menunjukkan bahwa distribusi bantuan yang merata untuk mendukung usaha di seluruh wilayah yang ada di DIY. Bantuan hibah diberikan kepada masyarakat juga berupa pembangunan rumah layak huni gaya tradisional Jawa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penerima melalui hunian yang lebih layak. Bantuan peralatan produksi serta dukungan pembangunan rumah layak huni ini memungkinkan penerima untuk dapat mengembangkan usaha serta mendapatkan usaha yang lebih baik yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di DIY dalam jangka panjang.

Hasil penelitian ini didukung hasil dari penelitian terdahulu oleh Campillo dkk (2023) menyatakan bahwa untuk penurunan tingkat kemiskinan dibutuhkan jangka panjang dalam pelaksanaan program kegiatan dari pemerintah pusat, hal ini sejalan dengan hasil penelitian ini bahwa program kegiatan Dana Keistimewaan yang di evaluasi setiap tahunnya terutama untuk program penurunan tingkat kemiskinan, capaian Dana Keistimewaan tahun lalu yang belum berdampak ditahun berjalan merupakan evaluasi untuk pelaksanaan Dana Keistimewaan tahun berjalan sehingga di tahun berjalan memiliki

pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan, program kegiatan keistimewaan yang disalurkan ke desa diharapkan bisa menjadi pemantik kemandirian desa yang ada di DIY sehingga dapat meningkatkan produktivitas di masing-masing desa yang akan berdampak kepada peningkatan pendapatan serta penurunan tingkat kemiskinan di DIY. Penelitian dari Ribson dkk (2024) yang menyatakan bahwa alokasi dana pemerintah pusat yang disalurkan atau dalam penelitian tersebut berupa *Emergency Social Safety Net* (ESSN) di Turkey secara signifikan mengurangi intensitas kemiskinan multidimensi diantara penerima manfaat. Penelitian dari Ajisafe dkk (2024) menyatakan bahwa kebijakan pemerintah melalui *Social Cash Transfer* dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan di Nigeria.

Hasil penelitian terdahulu yang meneliti mengenai Dana Otonomi Khusus yang disalurkan di Indonesia yaitu penelitian dari Budiratna dan Qibthiyah (2020) yang menyatakan bahwa transfer Dana Otonomi Khusus di Papua Barat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Papua Barat.

Hasil dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dari Aini dan Suharto (2024) yang menyebutkan bahwa Dana Keistimewaan tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di DIY. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa Dana Keistimewaan yang disalurkan di masing-masing Kabupaten/Kota untuk mendukung kegiatan budaya dan tradisi sehingga Dana Keistimewaan yang disalurkan dalam urusan kebudayaan tersebut belum bisa berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan karena kebijakan tersebut belum

sepenuhnya diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melainkan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di DIY.

4.2.2 IPM terhadap penurunan Kemiskinan di DIY

Berdasarkan hasil dari regresi data panel statis dan regresi data panel dengan Metode Adaptive Model menunjukkan bahwa IPM tahun berjalan dan IPM t-1 memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan pada tahun berjalan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dibangun dalam rangka untuk menekankan pentingnya manusia beserta sumber daya yang dimilikinya dalam pembangunan. Indikator IPM terdiri atas umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Umur panjang diukur melalui umur harapan hidup. Pengetahuan diukur rata-rata lama sekolah bagi penduduk usia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah bagi penduduk usia 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan (Badan Pusat Statistik, 2023). Berdasarkan indikator IPM tersebut, pembangunan manusia yang diarahkan dalam usaha untuk meningkatkan usia harapan hidup, kesehatan dan pendidikan secara signifikan dapat menurunkan angka kemiskinan. Dengan demikian angka kemiskinan berkaitan erat dengan faktor-faktor umur panjang, hidup sehat, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Pelaksanaan program wajib belajar, biaya kesehatan gratis dan peningkatan hidup yang layak bagi masyarakat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. kebijakan pemerintah dalam penurunan

angka kemiskinan, akan lebih efektif dan efisien jika diarahkan untuk peningkatan IPM.

Dana keistimewaan sejak tahun 2019 telah diarahkan untuk peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyediaan bus sekolah, sehingga akses sekolah menjadi pendek. Dana keistimewaan juga fokus dalam pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas dengan pendidikan dan pelatihan usaha mikro kecil dan menengah yang diperuntukkan untuk orang miskin.

Pelayanan pos terpadu (Posyandu) juga telah menjadi fokus dana keistimewaan melalui intervensi pada posyandu disabilitas, lansia dan balita. Layanan pos yandu yang diselenggarakan masyarakat telah diintervensi dengan alokasi dana keistimewaan berdampak pada peningkatan hdiup sehat masyaarakat miskin.

Selain itu kebahagiaan masyarakat miskin menjadi fokus dana keistimewaan melalui kegiatan event-event budaya untuk pelestarian dan pengembangan budaya lokal dan ekonomi telah menghibur masyarakat miskin yang berdampak pada usia harapan hidup lebih panjang. Alokasi dana keistimewaan jaga warga, tim *Search And Rescue* (SAR) obyek wisata dan penyediaan ambulance masyarakat berdampak pada keamanan, kenyamanan, dan ketenangan masyarakat miskin di DIY.

Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta yang menyebutkan bahwa dana keistimewaan Yogyakarta untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Orang miskin yang

merasa bahagia, tenteram, aman, nyaman dan senang merupakan bagian dari kesejahteraan masyarakat.

Dana keistimewaan telah dimanfaatkan untuk perbaikan rumah rumah tangga miskin melalui pembangunan rumah tidak layak huni. Kegiatan ini berdampak pada standar hidup layak orang miskin, dimana bentuk bangunan ruman baik lantai, dinding dan atap sudah permanen termasuk sarana buang air besar. Alokasi dana keistimewaan pada sektor ini berdampak pada peningkatan hidup layak rumah tangga miskin, walaupun tidak berdampak pada peningkatan pendapatannya. Melalui Dana Keistimewaan output untuk mendukung peningkatan IPM melalui peningkatan pendidikan seperti program beasiswa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY. Program beasiswa yang disalurkan melalui Dana Keistimewaan seperti Kartu Cerdas yang ditujukan untuk siswa SMA/SMK miskin di DIY, Beasiswa Inklusi yang ditujukan untuk anak berkebutuhan khusus dan Momenku Beasiswa Siap Berkemas yang ditujukan untuk siswa SMK yang berprestasi.

Lajang Cakap (Layanan Antar Jemput Anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka) yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul dibawah naungan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Peningkatan Kesehatan juga didukung oleh Dana Keistimewaan melalui Gelas Berlian Sinuri (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Aksi Bunuh Diri) merupakan salah satu inovasi yang dibentuk oleh UPT Puskesmas Semanu II untuk mengatasi angka bunuh diri yang sebagian besar korbannya adalah lansia serta permasalahan Kesehatan menahun,

kurangnya dukungan dari pihak keluarga dan permasalahan ekonomi merupakan alasan bagi lansia di Gunungkidul untuk lebih cepat mengakhiri hidupnya, selanjutnya di Kabupaten Kulon Progo terdapat Posbindu Sentosa merupakan output kegiatan dari UPT Puskesmas Sentolo II sebagai perluasan layanan puskesmas pada kaum difabel tidak hanya pada layanan Kesehatan namun juga pada aspek sosial dan ekonomi ; Inovasi Pentamarto (Pelatihan penanganan Kegawatdaruratan bagi Masyarakat Ngayogyakarta) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta membekali masyarakat dengan keterampilan bantuan hidup dasar dan perlunya memberikan pelatihan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan melakukan pertolongan bantuan hidup dasar dalam kasus henti jantung dan pentingnya penyediaan alat AED (*Automated External Defibrillator*) terutama di lokasi publik sebagai antisipasi penanganan respon cepat kegawat daruratan henti jantung.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Prasetyoningrum dan Sukmawati (2018) yang menyatakan bahwa IPM memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Tiga dimensi yang terdapat dalam IPM yakni kesehatan, pendidikan dan hidup layak ini menentukan kualitas hidup manusia dimana ketiga dimensi tersebut memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang berdampak kepada penurunan kemiskinan, pendidikan yang merupakan komponen dari IPM ini memiliki peran penting dalam peningkatan kapasitas serta kemampuan yang dapat meningkatkan pertumbuhan serta Pembangunan dan Kesehatan yang memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas masyarakat sehingga IPM memiliki pengaruh terhadap penurunan

kemiskinan. Penelitian terdahulu oleh Ahmad dkk (2019) menyatakan bahwa indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, dari ketiga dimensi yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia, dimensi pendidikan yang dominan mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan kemiskinan di Sulawesi Tenggara.

4.2.3 TPT terhadap penurunan Kemiskinan di DIY

Berdasarkan hasil regresi baik metode regresi panel statis dan metode regresi panel dengan Adaptive Model menunjukkan bahwa TPT tahun berjalan dan TPT t-1 tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di DIY tahun berjalan. Kondisi seseorang disebut dengan pengangguran, yang pertama kondisi seseorang disebut menganggur apabila masuk dalam kategori angkatan kerja dan sedang aktif mencari pekerjaan untuk mendapatkan upah namun belum memiliki kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, dimana dinegara berkembang ini pendidikan yang dipandang sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan kesempatan kerja yang ada sehingga tujuan akhir dari program pendidikan di negara berkembang yaitu dimana seseorang yang mengenyam pendidikan mendapatkan lapangan pekerjaan yang diharapkan (Muslim, 2018).

Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia menyatakan bahwa pengangguran di Indonesia sebesar 12% didominasi oleh lulusan sarjana dan diploma, besarnya angka pengangguran terdidik ini disebabkan oleh kurangnya keterhubungan serta keselarasan antara institusi pendidikan tinggi dengan pasar tenaga kerja dan saat ini kelompok pekerja didominasi oleh individu yang

berasal dari lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Dasar (SD) fenomena ini menunjukkan bahwa lulusan SMP dan SD cenderung memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi dalam memilih jenis pekerjaan sehingga individu dengan lulusan SMP dan SD lebih mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kesempatan kerja yang tersedia serta tidak membutuhkan kualifikasi pendidikan yang tinggi (<https://ugm.ac.id/id/berita> , diakses pada tanggal 29 September 2024).

Berdasarkan data Sistem Informasi Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022 jumlah angkatan kerja yang bekerja di DIY untuk lulusan Sarjana dan Diploma sebesar 18,28 persen dari total jumlah angkatan kerja di DIY, untuk jumlah angkatan kerja yang bekerja di DIY untuk lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 38,60 persen dari total jumlah angkatan kerja di DIY dan untuk jumlah lulusan angkatan kerja yang bekerja di DIY lulusan SD dan SMP sebesar 43,12 persen. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja di DIY didominasi oleh individu dengan lulusan SD dan SMP yang memiliki tingkat adaptabilitas yang tinggi dalam memilih jenis pekerjaan mengingat Upah Minimum Provinsi DIY masih rendah yakni pada tahun 2022 sebesar Rp1.840.916,00 dan pada tahun 2023 menjadi Rp1.981.782,00 sehingga jumlah pengangguran di DIY saat ini didominasi oleh kelompok individu dengan lulusan Sarjana/Diploma dimana setiap orang yang mengenyam pendidikan tinggi bisa dikategorikan orang yang mampu dan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DIY.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian dari Alifah dan Imaningsih (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pengangguran terbuka tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Ngubane dkk (2023) yang menyatakan bahwa pengangguran memiliki dampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Afrika Selatan, tingkat kemiskinan akan meningkat secara bersamaan ketika terdapat guncangan secara positif dari tingkat pengangguran.

4.2.4 Laju Pertumbuhan PDRB terhadap penurunan Kemiskinan di DIY

Berdasarkan hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan Kemiskinan di DIY sementara hasil regresi data panel dengan Adaptive Model menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB $t-1$ memiliki pengaruh terhadap penurunan Kemiskinan di DIY pada tahun berjalan hal ini berarti bahwa kinerja perekonomian tahun lalu baru berdampak terhadap perekonomian pada masa sekarang sehingga laju pertumbuhan PDRB di DIY tidak secara langsung memengaruhi kemiskinan saat itu juga namun membutuhkan lag waktu. Pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan di DIY melalui beberapa tahapan yang tidak secara langsung menurunkan tingkat kemiskinan pada tahun berjalan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di DIY dapat membantu peningkatan pendapatan masyarakat di DIY melalui peningkatan produksi serta konsumsi, dengan meningkatnya pendapatan masyarakat maka akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa serta meningkatkan kualitas hidup. Pendapatan masyarakat

secara umum ini dapat di distribusikan secara merata atau tidak merata di antara masyarakat, dalam hasil penelitian ini pertumbuhan ekonomi t-1 memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan sehingga dapat diartikan bahwa distribusi pendapatan di DIY ini cenderung merata ke seluruh kalangan sehingga dapat membantu dalam penurunan kemiskinan melalui peningkatan akses terhadap sumber daya bagi masyarakat miskin yaitu meningkatnya akses ke pendidikan, Kesehatan serta infrastruktur yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di DIY.

Berdasarkan Berita Resmi Statistik (2024) pertumbuhan ekonomi DIY dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2023 tumbuh sebesar 0,91 persen dimana lapangan usaha dengan pertumbuhan paling tinggi berada di lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 25,08 persen. Lapangan usaha yang mendominasi di DIY yaitu lapangan usaha industri pengolahan dengan presentase sebesar 12,07 dan lapangan usaha yang mendominasi di DIY kedua adalah lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 10,87 persen. Dengan meningkatnya pertumbuhan lapangan usaha di DIY ini diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan secara berkelanjutan pada tahun yang akan datang.

Melalui Dana Keistimewaan untuk meningkatkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan melalui Kebijakan Strategis Gubernur terdapat Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Tata Kelola Pertanahan pada Urusan Keistimewaan Pertanahan. BKK Tata Kelola Pertanahan ini mulai disalurkan pada tahun 2022. BKK Tata Kelola Pertanahan diberikan untuk meningkatkan

pemanfaatan tanah kas desa pada masing-masing kalurahan di DIY serta untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, dimana BKK Tata Kelola Pertanian ini digarap oleh kelompok masyarakat miskin di masing-masing kalurahan. Pada tahun 2022 BKK Tata Kelola Pertanian di salurkan kepada tiga kalurahan yaitu Kalurahan Sriharjo Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul, Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul dan Kalurahan Caturharjo Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman dengan total anggaran sebesar Rp291.072.000,00. Bentuk kegiatan BKK Tata Kelola Pertanian pada tahun 2022 berupa pertanian padi, jahe, bawang merah dan kedelai yang digarap oleh 79 kelompok penerima manfaat dengan total pendapatan dari ketiga kalurahan tersebut per Desember 2022 yaitu Rp413.827.208,00. Pada tahun 2023 BKK Tata Kelola Pertanian disalurkan kepada 11 Kalurahan di DIY dengan total anggaran sebesar Rp1.841.825.000,00. Bentuk kegiatan BKK Tata Kelola Pertanian pada tahun 2023 berupa pertanian padi, bawang merah, kedelai, cabai, timun, melon jagung, ubi jalar serta ternak kambing yang digarap oleh 705 kelompok penerima manfaat dengan total pendapatan per Desember 2023 sebesar Rp2.801.236.894,00.

Disalurkannya BKK Dana Keistimewaan ke Kalurahan Tata Kelola Pertanian ini dapat meningkatkan produktivitas serta pendapatan dari komoditas pertanian dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di DIY dimana lapangan usaha di DIY menyumbang pertumbuhan PDRB tertinggi. Kebijakan ini secara langsung menjadikan masyarakat miskin sebagai target untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya yang lebih

produktif serta meningkatkan kapasitas produksi, dengan adanya peningkatan pendapatan ini maka akan membantu penurunan kemiskinan di DIY terutama di wilayah pedesaan. Dengan memberikan akses pengelolaan tanah kepada kelompok masyarakat miskin dan meningkatkan produktivitas melalui sektor pertanian dan perternakan maka kebijakan penyaluran BKK Dana Kesitimewaan ke Kalurahan Tata Kelola Pertanahan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, seiring dengan peningkatan produktivitas serta pendapatan, penyaluran BKK Tata Kelola Pertanahan ini dapat mempercepat Pembangunan ekonomi di wilayah pedesaan di DIY serta dapat menurunkan angka kemiskinan di DIY secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian dari Ngubane dkk (2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang dapat mengurangi tingkat kemiskinan jangka panjang dan hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Li dkk (2024) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat mengatasi jebakan kemiskinan dan mendorong Pembangunan.. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian dari Wulandari & Rachmawati (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

4.2.5 Capaian Dana Keistimewaan, IPM, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan PDRB terhadap penurunan Kemiskinan di DIY

Berdasarkan hasil regresi metode data panel statis dan metode data panel dengan adaptive model menunjukkan bahwa Capaian Dana Keistimewaan, IPM,

TPT dan Laju Pertumbuhan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan angka kemiskinan dipengaruhi oleh banyak variabel. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat diturunkan melalui peningkatan secara simultan pada variabel-variabel capaian dana keistimewaan, IPM, dan laju pertumbuhan PDRB serta penurunan TPT. Ke empat variabel ini perlu terus ditingkatkan kinerjanya untuk dapat menurunkan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil metode regresi data panel statis Dana Keistimewaan memiliki pengaruh yang negatif terhadap penurunan Kemiskinan di DIY sementara hasil dari metode regresi data panel adaptive menunjukkan bahwa Dana Keistimewaan $t-1$ tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan Kemiskinan di tahun berjalan hal tersebut karena capaian Dana Keistimewaan tahun n merupakan capaian dari alokasi anggaran yang telah di evaluasi pada $t-1$ dan baru berdampak terhadap penurunan kemiskinan pada tahun n . Komitmen Pemerintah DIY dalam mengelola Dana Keistimewaan tertuang dalam Grand Design Keistimewaan tahun 2021-2042 bahwa sasaran pembangunan daerah DIY yaitu Pertumbuhan Ekonomi ; Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ; Indeks Gini ; Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Kemiskinan yang didukung oleh Program Urusan Keistimewaan. Pada tahun 2023 telah dilaksanakan program kegiatan keistimewaan untuk membantu penurunan angka kemiskinan di DIY yaitu sub kegiatan pengembangan kewirausahaan desa aktivitas yang dilaksanakan berfokus kepada peningkatan kapasitas UMKM di kalurahan, pelaksanaan sertifikasi halal, ekspor produk UMKM, pelatihan kewirausahaan serta promosi produk lokal melalui pameran serta kegiatan pemasaran untuk mendukung UMKM yang ada di DIY ; Sub kegiatan pengembangan ekonomi perempuan dengan aktivitas kegiatan yang menysasar kepada kelompok perempuan melalui pembinaan kelompok ekonomi perempuan serta implementasi prima setara yang dapat

memperkuat peran perempuan dalam ekonomi lokal ; Sub kegiatan pengembangan lumbung mataraman melalui aktivitas pengembangan lumbung pangan di kalurahan, pengembangan pertanian serta penguatan cadangan pangan serta potensi pangan lokal yang mendukung peningkatan ketahanan pangan lokal serta mendukung petani lokal ; Sub kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya melalui aktivitas pelatihan peningkatan kompetensi tenaga kerja, pembangunan karakter anggaran kerja melalui padat karya untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja, memperkuat budaya kerja dan meningkatkan produktivitas ; Sub kegiatan pengembangan desa budaya dengan aktivitas pemberdayaan desa melalui event kesenian, aktivitas ini dapat mendukung penurunan kemiskinan melalui penggerakan di sektor pariwisata serta budaya sebagai sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat ; Sub kegiatan pengembangan muatan lokal melalui aktivitas penyaluran beasiswa serta program manajemen usaha siswa dan pelatihan berbasis budaya yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kesadaran budaya di kalangan generasi muda. Dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, Dana Keistimewaan juga disalurkan untuk hibah melalui urusan keistimewaan kebudayaan berupa peralatan produksi untuk membantu peningkatan produksi UMKM di DIY serta Integrasi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dengan Gaya Khas Tradisional Jawa dan Konstruksi Pembangunan Baru Rumah Layak Huni dengan Gaya Khas Tradisional Jawa untuk

membantu masyarakat miskin yang masih memiliki tempat tinggal yang kurang layak di DIY.

2. Berdasarkan hasil dari regresi data panel statis dan regresi data panel dengan Metode Adaptive Model menunjukkan bahwa IPM tahun berjalan dan IPM t-1 memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan pada tahun berjalan. Pelaksanaan program wajib belajar, biaya kesehatan gratis dan peningkatan hidup yang layak bagi masyarakat memberikan kontribusi secara signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Kebijakan pemerintah dalam penurunan angka kemiskinan, akan lebih efektif dan efisien jika diarahkan untuk peningkatan IPM. Melalui Dana Keistimewaan output untuk mendukung peningkatan IPM melalui peningkatan pendidikan seperti program beasiswa yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY berupa beasiswa kartu cerdas, beasiswa inklusi dan momenku siap berkemas, selain itu melalui Dana Keistimewaan terdapat inovasi Lajang Cakap yang merupakan layanan antar jemput anak Gunungkidul Calon Kader Pemustaka untuk mempermudah siswa di Gunungkidul dalam mobilitas sekolah. Untuk peningkatan aspek Kesehatan melalui Dana Keistimewaan melalui inovasi Gelas Berlian Sinuri (Gerakan Lansia Sehat Berdaya Lindungi Aksi Bunuh Diri) merupakan salah satu inovasi yang dibentuk oleh UPT Puskesmas Semanu II untuk mengatasi angka bunuh diri ; Posbindu Sentosa merupakan output kegiatan dari UPT Puskesmas Sentolo II sebagai perluasan layanan puskesmas pada kaum difabel tidak hanya pada layanan

Kesehatan namun juga pada aspek sosial dan ekonomi dan Inovasi Pentamarto (Pelatihan penanganan Kegawatdaruratan bagi Masyarakat Ngayogyakarta) yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta membekali masyarakat dengan keterampilan bantuan hidup dasar dan perlunya memberikan pelatihan kepada masyarakat agar memiliki kemampuan melakukan pertolongan bantuan hidup dasar.

3. Berdasarkan hasil regresi baik metode regresi panel statis dan metode regresi panel dengan Adaptive Model menunjukkan bahwa TPT tahun berjalan dan TPT t-1 tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di DIY tahun berjalan. Jumlah pengangguran di DIY saat ini didominasi oleh kelompok individu dengan lulusan Sarjana/Diploma dimana setiap orang yang mengenyam pendidikan tinggi bisa dikategorikan orang yang mampu dan tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DIY.
4. Berdasarkan hasil regresi data panel statis menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap penurunan Kemiskinan di DIY sementara hasil regresi data panel dengan Adaptive Model menunjukkan bahwa Laju Pertumbuhan PDRB t-1 memiliki pengaruh terhadap penurunan Kemiskinan di DIY pada tahun berjalan hal ini berarti bahwa kinerja perekonomian tahun lalu baru berdampak terhadap perekonomian pada masa sekarang sehingga laju pertumbuhan PDRB di DIY tidak secara langsung memengaruhi kemiskinan saat itu juga namun membutuhkan lag waktu. DIY pertumbuhan paling tinggi untuk laju pertumbuhan PDRB yaitu pertumbuhan lapangan usaha

pertanian, kehutanan dan perikanan yang tumbuh sebesar 25,08 persen. Melalui Dana Keistimewaan untuk meningkatkan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan melalui Kebijakan Strategis Gubernur terdapat Bantuan Khusus Keuangan (BKK) Tata Kelola Pertanahan pada Urusan Keistimewaan Pertanahan yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan tanah kas desa dan produktivitas masyarakat miskin.

5. Berdasarkan hasil regresi metode data panel statis dan metode data panel dengan adaptive model menunjukkan bahwa Capaian Dana Keistimewaan, IPM, TPT dan Laju Pertumbuhan PDRB secara bersama-sama berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan di DIY.
6. Berdasarkan hasil penelitian ini, Dana Keistimewaan dapat secara langsung membantu penurunan tingkat kemiskinan melalui aktivitas-aktivitas keistimewaan yang telah dilaksanakan dan dapat membantu penurunan kemiskinan melalui peningkatan tingkat IPM, penurunan TPT serta peningkatan pertumbuhan PDRB. Peningkatan IPM melalui Dana Keistimewaan dengan beasiswa, pelatihan kewirausahaan, dan layanan inovatif yang memudahkan akses pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat rentan. Dalam penelitian ini TPT tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan namun melalui Dana Keistimewaan telah dilaksanakan peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui program padat karya dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas dan pengurangan kemiskinan dalam jangka panjang. Peningkatan laju pertumbuhan PDRB

melalui Dana Keistimewaan dengan peningkatan di sektor pertanian yaitu penyaluran BKK Kalurahan Tata Kelola Pertanian.

5.2 Implikasi dan Saran

1. Pemerintah Daerah DIY perlu untuk memperkuat evaluasi perencanaan alokasi Dana Keistimewaan serta memastikan jangka waktu perencanaan dan pelaksanaan tidak terlalu jauh dalam artian tidak menunda pelaksanaan kegiatan setelah perencanaan anggaran sudah ditetapkan agar dampak yang dirasakan oleh masyarakat dapat dirasakan lebih cepat. Dalam sisi monitoring dan evaluasi, pemerintah DIY perlu memperkuat monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Dana Keistimewaan agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran serta dapat beradaptasi dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Penguatan sisi monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk mengurangi kebocoran anggaran serta lebih difokuskan kepada kegiatan yang dapat membantu penurunan kemiskinan.
2. Untuk membantu penurunan kemiskinan melalui peningkatan IPM, Pemerintah Daerah DIY dapat meningkatkan investasi yang lebih besar dalam pendidikan, kesehatan dan kualitas hidup masyarakat misalnya pemerintah dapat menargetkan peningkatan kualitas pendidikan serta akses layanan kesehatan di wilayah pedesaan atau wilayah tertinggal di DIY sehingga dampak dari peningkatan IPM ini lebih merata dan dapat mempercepat untuk penurunan kemiskinan di DIY.
3. Penciptaan lapangan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi pendidikan khususnya untuk lulusan perguruan tinggi perlu ditingkatkan, misalnya

melalui program pelatihan kewirausahaan atau peningkatan keterampilan berbasis permintaan pasar. Sehingga lulusan perguruan tinggi bisa dapat lebih produktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru atau mendapatkan pekerjaan sesuai dengan latar belakang pendidikan.

4. Laju pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi DIY membutuhkan waktu untuk berdampak terhadap penurunan kemiskinan di DIY sehingga Pemerintah Daerah DIY perlu mengembangkan strategi jangka panjang serta memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan program-program yang mempercepat pertumbuhan ekonomi seperti meningkatkan sektor UMKM serta investasi lokal untuk lebih cepat memengaruhi penurunan kemiskinan di DIY
5. Sinergi antara Dana Keistimewaan, peningkatan IPM, penurunan TPT dan peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu diperkuat melalui kebijakan yang lebih terintegrasi, misalnya meningkatkan keterkaitan antara program kegiatan yang dilaksanakan melalui Dana Keistimewaan untuk peningkatan IPM serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di DIY serta dapat memastikan bahwa kebijakan ketenagakerjaan dapat menciptakan peluang ekonomi yang merata untuk penurunan kemiskinan yang dicapai secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Farida Nur & Suharto. (2024). *Analisis Pengaruh Dana Keistimewaan terhadap Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022*. Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan. Volume 3 Issue 1, 2024 : 24-32.
- Ajisafe, R.A., Okunade, S.U., & Fatai M.O. (2024). *Modelling Structural Breaks In Social Cash Transfers Effect On Poverty And Inequality Reduction In Afrika : A Case of Nigeria*. Elsevier, Scientific African 23 (2024) e02106.
- Alifah, Khindya & Imaningsih, Niniek. (2023). *Tingkat Pendidikan, Upah Minimum dan Tingkat Penganggura Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Equilibrium Volume 12. No.1 Tahun 2023 Hal 1-11.
- Azhari, Imam Ma'ruf & Faridatussalam, Sitti Retno. (2023). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Tahun 2016-2021: Studi Kasus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 21 No. 3 (2023).
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Sustainable Development Goals (SDGs)*. <https://sdgs.bappenas.go.id/> , 11 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta. *Indeks Pembangunan Manusia*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>, 14 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta. *Kemiskinan dan Ketimpangan*. <https://yogyakarta.bps.go.id/> , 13 Mei 2024.

- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta. *Produk Domestik Regional Bruto (Lapangan Usaha)*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>, 14 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta. *Tenaga Kerja*. <https://yogyakarta.bps.go.id/>, 14 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Berita Resmi Statistik Profil Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta*. <https://yogyakarta.bps.go.id/> , 11 Mei 2024.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Pesentase Kemiskinan di 38 Provinsi Indonesia*. <https://www.bps.go.id/> , 11 Mei 2024.
- Bella & Huda. (2023). *Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi*, Volume 2, No.2, Januari-Juni 2023.
- Budiratna, Hasta & Qibthiyah, Riatu M. (2020). *Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat*. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, Vol. 1, No. 5 Desember 2020.
- Danson, Mike ; Galloway, Laura ; dan Sherif, Mohamed. (2021). *From Unemployment to Self-Employment : Can Enterprise Policy Intensify the Risk of Poverty*. *ELSIVIER* : Volume 75, March 2021, 102164.
- Farhan, Muhammad & Sugianto. (2022). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa*. Volume 1 No. 4 (Maret 2022).

- Grehenson, Gusti. (2023). *Menaker : 12 Persen Pengangguran di Indonesia Didominasi Lulusan Sarjana dan Diploma*. Dapat diakses di <https://ugm.ac.id/id/berita> , diakses pada tanggal 29 September 2024.
- Ksatria, Ilham., Istiqomah & Arintoko. (2022). *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Sektoral terhadap Kemiskinan di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Volume 22, No. 1 Juli 2022.
- Li, Jiachen, Li, Hao, Shang, Xianfa, Pu, Yang, Zhang, Mengtian dan Pan, Xinchun. (2024). *Exploring the impact of fintech, human capital, mineral policy, and institutional quality on poverty traps: Evidence from resource-dependent economies*. *Resources Policy* Volume 93, June 2024, 105015.
- Machira, K., Mgonezulu, W.R., & Malata, M. (2023). *Understanding poverty dimensions and transitions in Malawi*. Elsevier, *Research in Globalization* 7 (2023) 100160.
- Ngubane, Mbongeni Zwelakhe ; Mndebele, Siyabonga & Kaseeram, Irshaad. (2023). *Economic Growth, Unemployment and Poverty : Linear and Non-Linear Evidence from South Africa*. *ELSIVIER* : Volume 9, Issue 10, October 2023, e20267.
- O'Brien, Timothy E & Silcox, Jack W. (2024). *Nonlinear Regression Modelling : A Primer with Applications and Caveats*. Springer, *Society for Mathematical Biology* (2024) 86:40.

Patel-Campillo, Anouk & Garcia, S.V.B (2022). *Breaking The Poverty Cycle? Conditional Cash Transfer And Higher Education Attainment*. Elsevier, International Journal of Educational Development 92 (2022) 102612.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2015). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap I dan Tahap II Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2014*. Yogyakarta : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2016). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2015*. Yogyakarta : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2017). *Laporan Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2016*. Yogyakarta : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2018). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2017*. Yogyakarta : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2019). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan*

Tahun Anggaran 2018. Yogyakarta : Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2019*. Yogyakarta : Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2021). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2020*. Yogyakarta : Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2020*. Yogyakarta : Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2023). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022*. Yogyakarta : Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. (2024). *Laporan Pencapaian Kinerja Tahap Akhir Pelaksanaan Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2023*. Yogyakarta : Paniradya Kaistimewan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan
Pemerintah DIY

Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan
Keistimewaan.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Penugasan Urusan
Keistimewaan

Peraturan Gubernur DIY Nomor 131 Tahun 2021 Tentang *Grand Design*
Keistimewaan DIY Tahun 2022-2042.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan
Daerah DIY Tahun 2023-2026.

Prasetyo, Angger Gigih & Fitanto, Bahtiar. (2023). *Pengaruh Indeks
Pembangunan Manusia dan Angka Pengangguran terhadap Tingkat
Kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Journal Of Development
Economic And Social Studies, Volume 2 No. 4 Tahun 2023.

Prasetyoningrum, Ari Kristin & Sukmawati, U. Sulia. (2018). *Analisis Pengaruh
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pertumbuhan Ekonomi dan
Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi
Syariah. Volume 6, Nomor 2, 2018, 2017-240.

Robson, M., Vollmer, F., Dogan, B.B., & Grede, Nils. (2024).*Distributional
Impacts Of Cash Transfers On The Multidimensi Poverty Of Refugees :*

The Emergency Social Safety Net in Turkey. Elsevier, World Development 179 (2024) 106599.

Sistem Informasi Gender dan Anak. (2023). *Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin*. Dapat diakses di <https://siga.jogjaprov.go.id/> , diakses pada tanggal 29 September 2024.

Sriyana, Jaka. (2014). *Metode Regresi Data Panel*. Yogyakarta : EKONISIA.

Sriyana, Jaka. (2018). *Determinants of Inflation in the Local Economy*. Etikonomi: Jurnal Ekonomi. Vol. 17 (1): 1 – 10.

Suripto & Subayil, Lalu. (2020). *Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di D.I.Yogyakarta Priode 2010-2017*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan, Volume 1 No. 2, 2020.

Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Widyastuti, A.T., Hartono, D., Sidig, D.S., & Rusmawati, E. (2023). *Financial Inclusion's Impact On Energy Poverty : Evidence From Indonesia*. Elsevier, World Development Sustainability 3 (2023) 100113.

Wulandari, Risa & Rachmawati, Lucky. (2021). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan IPM terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Pasuruan*. Journal Of Economics Volume 1 Nomor 3 2021 Page 111-128.

Ahmad ; Syarif, Muhammad ; Saranani, Fajar ; Rumia, Wali Aya. (2019). *The Impact of Human Development Index on Poverty in Sotheast Sulawesi. SSRG International Journal of Economics and Management Studies. Volume 6 Issue 12, 30-36, Dec 2019.*

LAMPIRAN

Lampiran 1 Aktivitas mendukung penurunan kemiskinan pada Tahun Anggaran 2023

No	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Aktivitas
1	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Rp43.582.127.000,00	<p>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Maju)</p> <p>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Budaya (Tahap Pengembangan)</p> <p>Peningkatan kapasitas UMKM di Desa Mandiri Budaya (Tahap Penumbuhan)</p> <p>Pameran Produk UMKM di destinasi wisata</p> <p>Rembug Desa Usaha Gotong Royong di Desa wisata</p> <p>Tamansari (temu bersama Insan Koperasi)</p> <p>Klinik koperasi: 35 koperasi</p> <p>Fasilitasi promosi dan pemasaran produk UMKM : 500 UMKM</p> <p>Pameran Gerai Produk UMKM DIY :40 UMKM</p> <p>Sertifikasi Halal: 500 UMKM</p> <p>Ekspor produk UMKM: 2000 kg</p> <p>Inkubator Bisnis: 10 WUB</p> <p>Fasilitasi Ongkos Kirim : 58.750 kiriman</p> <p>Score training bagi UKM: 10 UKM</p> <p>Gebyar hari UKM: 1 event</p> <p>semarak sibakul KUMKM: 1 event</p> <p>Penguatan Produk lokal istimewa: 60 produk</p> <p>Branding produk lokal: 1 kegiatan</p> <p>Pelatihan dan Pendampingan Digital Campaign: 25 UMKM</p> <p>Bimtek dan fasilitasi sertifikai PIRT: 60 kali</p> <p>Pameran UMKM mendukung ATF: 1 event</p> <p>Masterplan Desa Mandiri Budaya tahun 2023: 2 dokumen</p> <p>Pelatihan kemasan dan branding produk untuk produk unggulan agrobisnis: 1 kali</p> <p>Gelar Pameran Wirausaha Baru: 1 kali</p> <p>Pameran Produk Unggulan Desa Preneur: 1 kali</p> <p>SIBAKUL Sport festival: 1 kali</p> <p>fasilitasi pasar tiban UMKM Pangan Lokal: 15 kali</p> <p>Pelatihan kewirausahaan di sentra UKM Khas Jogja: 15 kali</p>

No	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Aktivitas
2	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Rp6.418.221.900,00	Pembinaan Kelompok Ekonomi Perempuan: 30 Kalurahan Pembinaan dan Pengembangan Desa Prima: 5 kab kota Implementasi Prima Setara : 50 kalurahan
3	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Rp4.244.629.000,00	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Lestari Budaya : 10 KUBE
4	Pengembangan Lumbung Mataraman	Rp10.239.727.700,00	Lumbung Mataraman Tahap Pengembangan: 15 desa Lumbung Mataraman Tahap Kemandirian: 11 desa Pengembangan Pertanian di Lahan Sempit Perkotaan Peningkatan cadangan pangan masyarakat Pengembangan Potensi Pangan Lokal (Berbasis Kampung) Bimtek Petani Milenial Istimewa (Olahan Pangan Lokal potensi wilayah Lumbung Pangan Tradisional
5	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Rp10.157.520.000,00	Pelatihan kewirausahaan bagi angkatan kerja baru di desa mandiri budaya : 140 orang Peningkatan kompetensi angkatan kerja istimewa: 200 orang Implementasi pembangunan karakter angkatan kerja istimewa: 400 orang Internalisasi pembangunan karakter angkatan kerja istimewa (TOT): 40 orang Pendampingan Peningkatan Produktivitas melalui budaya kerja istimewa: 180 perusahaan Sosialisasi Pembangunan karakter Angkatan Kerja Istimewa: 1.500 orang Padat Karya Pengembangan Potensi Desa: 100 lokasi Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Maritim: 325 orang

No	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Aktivitas
7	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Rp33.833.424.700,00	<p>Pendampingan Desa Budaya 152 Pendamping : 12 Bulan</p> <p>Gelar Potensi Desa Budaya: 76 Desa Budaya</p> <p>Workshop SDM Desa Budaya: 1 kali</p> <p>Workshop Pendamping Budaya: 3 kali</p> <p>Sarpras Desa Budaya Gamelan Perunggu: 6 set</p> <p>Sarpras Desa Budaya Pakaian Pengrawit: 20 desa</p> <p>Studi Orientasi Desa Budaya: 1 kali</p> <p>Pentas Seni Desa Budaya di Bandara YIA: 8 event</p> <p>Fasilitasi Upacara Adat: 76 Desa Budaya</p> <p>Pentas Seni Desa Budaya Selasa Wagen: 76 Desa Budaya</p>
10	Pembinaan Muatan Lokal	Rp27.622.668.900,00	<p>Kartu Cerdas 14.500 siswa</p> <p>Beasiswa bgi anak ABK jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di sekolah inklusi 785 siswa</p> <p>Model Manajemen Kelompok Usaha Siswa</p> <p>Memberantas Kemiskinan (MOMENKU SIAP BERKEMAS) 10 SMK</p> <p>Pendidikan Khas Kejojjaan 1 kegiatan</p> <p>Pengembangan Taman SIswa 1 kegiatan</p> <p>Pengembangan Model PAUD 2 jenis</p> <p>Yogyakarta Youg Leader 1 technical meeting</p> <p>Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan berbasis Budaya 700 orang</p> <p>Evaluasi dan monitoring pelaksanaan pendidikan berbasis budaya di sekolah/madrasah 388 SMA dan SMK Negeri dan Swasta</p> <p>Geraka Seniman Masuk Sekolah 20 sekolah</p> <p>Gladi kawruh dan Ngudar Kawruh tembang 18 episode</p>
11	Bantuan Keuangan Khusus ke Kalurahan		
	Desa Mandiri Budaya	Rp24.500.000.000,00	25 kalurahan
	Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Budaya	Rp4.300.000.000,00	9 kalurahan
	Rintisan Desa Mandiri	Rp2.250.000.000,00	9 kalurahan

No	Subkegiatan	Pagu Anggaran	Aktivitas
	Budaya (Desa Prima)		
	Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Wisata)	Rp8.500.000.000,00	11 kalurahan
	Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Preneur)	Rp5.100.000.000,00	12 kalurahan
	Rintisan Desa Mandiri Budaya (Desa Mandiri Pangan)	Rp3.750.000.000,00	5 kalurahan
	Desa Maritim	Rp3.500.000.000,00	6 kalurahan
	Arsitektur Gaya Yogyakarta (Rtlh)	Rp18.750.000.000,00	66 kalurahan
	Padat Karya Jogja Istimewa	Rp19.950.000.000,00	112 kalurahan
	Tata Kelola Pertanian	Rp1.841.825.000,00	11 kalurahan

Sumber : Paniradya Kaistimewan, 2024

Lampiran 2 Hibah Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan Tahun Anggaran 2023

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Kelompok Pengrajin Bambu Gentan Agung	Gentan, Margoagung, Seyegan, Sleman	Peralatan Produksi	20.000.000
Kelompok Kerajinan Bambu Sumber Rezeki	Bulu, Hargomulyo, Gedangsari, Gunungkidul	Peralatan Produksi	20.000.000
Kelompok Kerajinan Bambu Karya Mandiri	Tonogoro, Banjaroyo, Kalibawang, Kulon Progo	Peralatan Produksi	20.000.000
Kerajinan Bambu Sido Dadi	Mertelu Kulon, Mertelu, Gedangsari, Gunungkidul	Peralatan Produksi	20.000.000
Karya Muda	Muntuk, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul	Peralatan Produksi	20.000.000
Kerajinan Bambu Sido Rukun	Bulu, Karangmojo, Gunung Kidul	Peralatan Produksi	20.000.000
Kelompok Pertukangan Karya Sejati	Muntuk, Mulusan, Paliyan, Gunungkidul	Peralatan Produksi	40.000.000
Kelompok Pengrajin Jati Ayu	Desa Jati Ayu, Karangmojo, Gunung Kidul	Peralatan Produksi	40.000.000
Kelompok Paguyuban Tukang Kayu Sido Mulyo	Dusun Jaten, Triharjo, Pandak, Bantul	Peralatan Produksi	40.000.000
Ikm Dlingo Manunggal	Koripan I Rt 02, Kec. Dlingo, Kab. Bantul	Peralatan Produksi	40.000.000
Kelompok Mebel Mekar Jati	Srumbung, Pengkok, Patuk, Gunung Kidul	Peralatan Produksi	40.000.000
Ikm Isaku Kayu	Tegalsari, Ngargosari, Samigaluh, Kulon Progo, Diy	Peralatan Produksi	40.000.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Kelompok Jamu Gendong Rejo Winangun	Rejowinangun Rw 8, Kotagede, Yogyakarta	Peralatan Produksi	22.500.000
Kelompok Dapur Ngebul	Kelurahan Pandean, Umbul Harjo, Yogyakarta	Peralatan Produksi	22.500.000
Kelompok Putri Mandiri	Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta	Peralatan Produksi	22.500.000
Kelompok Kebrokan	Kampung Kebrokan Rw 5, Kelurahan Pandean, Umbulharjo	Peralatan Produksi	22.500.000
Kelompok Punokawan	Kampung Tahunan Rw 2, Kelurahan Tahunan, Kemantren Umbulharjo	Peralatan Produksi	22.500.000
Kelompok Mutiara	Kampung Gelagahsari Rw 5, Kelurahan Warungboto, Umbulharjo	Peralatan Produksi	22.500.000
Kelompok Uppks	Kampung Ratmakan Rw 07, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Gondomanan Kota Yogyakarta	Peralatan Produksi	22.500.000
Kelompok Rotu Asri	Kelurahan Wirogunan Kemantren Mergangsan	Peralatan Produksi	22.500.000
Forkom Umkm Giwangan	Kelurahan Giwangan Kemantren Umbulharjo	Peralatan Produksi	22.500.000
Kelompok Pengolah Stroberi	Kelurahan Muja Muju Kemantren Umbulharjo	Peralatan Produksi	22.500.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Kelompok Pande Besi "Cahaya Alam" Kajar	Karangtengah, Wonosari, Gunungkidul	Peralatan Produksi	84.168.950
Kelompok Pande Besi "Bina Karya"	Klopo Sepuluh, Bendungan Wates, Kulonprogo	Peralatan Produksi	84.168.950
Kelompok Usaha Fashion Etnik, El-Fata	Ngaliyan, Pulutan, Wonosari, Gunungkidul	Peralatan Produksi	40.000.000
Kelompok Penjahit Melati Sejahtera	Tegalrejo, Gedangsari, Gunungkidul	Peralatan Produksi	40.000.000
Kelompok Al Fath	Sokategal, Merdikorejo Tempel Sleman	Peralatan Produksi	35.000.000
Kelompok Sumberejo Berkibar	Sumberrejo Tempel Sleman	Peralatan Produksi	35.000.000
Kelompok Sumber Rejeki	Sokategal Merdikorejo Tempel Sleman	Peralatan Produksi	35.000.000
Kelompok Kemiri Edum	Kemiri, Purwobinangun Pakem Sleman	Peralatan Produksi	35.000.000
Zainal,	Karangasem Rt.006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Siswadi,	Karangasem Rt.001, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Wonisar,	Karangasem Rt.006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Marsudi,	Karangasem Rt.006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Dedi Antoro,	Karangasem Rt.006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Harmanto Surat,	Karangasem Rt.006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Susanto,	Karangasem Rt.006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Kamijo,	Nogosari Ii Rt.004, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Paiyem,	Karangasem Rt.006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Partini,	Karangasem Rt.006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Tujiyah / Amat Asroni, Ny,	Karangasem Rt 006, Wukirsari, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Suratin,	Karangrejek Rt 06, Karangtengah, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Dodi Kastanto,	Karangrejek, Karangtengah, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Setu Mulyadi,	Karangrejek, Karangtengah, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Giman,	Karangrejek Rt 06, Karangtengah, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Sagiyem,	Karangrejek Rt 06, Karangtengah, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Warman Aditya,	Karangrejek, Karangtengah, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Dal,	Karangrejek, Karangtengah, Imogiri, Bantul	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Jumiarti,	Ngringin, Bejiharjo, Karangmojo	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Suyatno,	Ngringin, Bejiharjo, Karangmojo	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Slamet Waluyo,	Ngepung, Karangmojo, Karangmojo	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Sumiyem,	Ngepung, Karangmojo, Karangmojo	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Mukiyat,	Ngepung, Karangmojo, Karangmojo	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Sawito,	Gedangan, Gedangrejo, Karangmojo	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Miran,	Gedangan, Gedangrejo, Karangmojo	Integrasi Pembangunan Baru Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	120.000.000
Sulistya Nuswantara,	Gendeng Gk Iv/263, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Sapta Ari Bawa,	Jl. Gondosuli Gk 4/147, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Mulyono,	Jl. Melati Wetan No 5 Rt. 55/Rw. 015, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Widodo,	Iromejan Rt : Rw :Rw 07, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Dasmi Samsuri,	Kepuh Gk 3/1107 Rt 45 Rw 11 Klitren Rt : Rw :45/11, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Sugiarti,	Iromejan Rt : Rw :31/08, Klitren, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Siti Trilatmini,	Jl. Melati Wetan No 1 Rt. 55/Rw. 015, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Rinawati,	Gendeng Gk Iv/387, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Ny Jamingah,	Gendeng Gk Iv / 738 Ykrt : Rw 073/018, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Budiman,	Basen Kg 3/279 Rt 015 Rw 004, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Sri Sunarti,	Gedongan Kg 3/100 Rt 006 Rw 002, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Priyo Sartoyo,	Gedongan Rt 00 Rw 001, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Ari Wijinastuti,	Gedongan No 40a Rt 002 Rw 001, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Taufiq Apriyanto Nugroho,	Gedongan Kg 3/56 Rt 04 Rw 02, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Ade Yono,	Pandean Rt 28 Rw 07, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Bani Sihono,	Dalem Rt 42 Rw 07, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Muji Santoso,	Basen Kg Iii/164 Rt 10 Rw 04, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Subardi Raharjo,	Alun-Alun Kg 3 Rt 37 Rw 09, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Kasiran,	Samakan Rt 34 Rw 08, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Suharni ,	Samakan Rt : Rw :034/08, Purbayan, Kotagede, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Marbangun Budi Santosa,	Rt 11 Rw 04, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Darsono,	Rt 08 Rw 03, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Rustiani,	Rt 45 Rw 13, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Puji Raharjo,	Rt 34 Rw 10, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Rr Sisca Aryati,	Rt 53 Rw 15, Suryodiningratan, Mantrijeron, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Sriwahyuningsih,	Tegal Mekantu Uh 2/357, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Ngatinem,	Sidobali Uh 2/404 Rt 026 Rw 08, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000

Nama Penerima	Alamat Penerima	Bantuan Hibah	
		Bentuk	Jumlah (Rp)
Parinah Pujowati,	Miliran Uh 2/272 Rt 005 Rw 02, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Jumanah,	Muja Muju Uh 2/754 Rt 055 Rw 12, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Suyadi,	Sidobali Uh 2/396 Rt 026 Rw 08, Mujamuju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta	Konstruksi Pb Rlh Dengan Gaya Khas Tradisional Jawa	50.000.000
Dewi Sri	Mojohuro, Sriharjo, Imogiri, Bantul	Bantuan Peralatan Usaha Kuliner Lokal, Kuliner Frozen Dan Merchandise	71.000.000
Total Anggaran			5.544.337.900

Sumber : Paniradya Kaistimewan, 2024

Lampiran 3 Presentase penduduk miskin menurut Kabupaten/Kota, Presentase Capaian Dana Keistimewaan, Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Laju Pertumbuhan PDRB di DIY Tahun 2014 s.d 2023

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan	Capaian Dana Keistimewaan	IPM	TPT	Pertumbuhan PDRB
Kota Yogyakarta	2014	8,67	16,17	83,78	6,35	5,28
	2015	7,7	51,67	84,56	5,52	5,09
	2016	7,7	89,30	85,32	5,52	5,11
	2017	7,64	93,75	85,49	5,08	5,24
	2018	6,98	37,92	86,11	6,22	5,49
	2019	6,84	94,94	86,65	4,8	5,96
	2020	7,27	98,88	86,61	9,16	-2,42
	2021	7,69	97,04	87,18	9,13	5,16
	2022	6,62	97,39	87,69	7,18	5,12
	2023	6,49	99,25	88,61	6,07	5,08
Kabupaten Bantul	2014	15,89	41,13	77,11	2,57	5,04
	2015	14,55	94,90	77,99	3	4,97
	2016	14,55	86,03	78,42	3	5,05
	2017	14,07	93,31	78,67	3,12	5,1
	2018	13,43	54,70	79,45	2,72	5,47
	2019	12,92	87,78	80,01	3,06	5,53
	2020	13,5	92,65	80,01	4,06	-1,65
	2021	14,04	94,20	80,28	4,04	5
	2022	12,27	92,67	80,69	3,97	5,19
	2023	11,95	93,88	81,74	3,78	5,06
Kabupaten Kulon Progo	2014	20,64	66,01	70,68	2,88	4,57
	2015	20,3	95,57	71,52	3,72	4,62
	2016	20,3	96,60	72,38	3,72	4,76
	2017	20,03	98,61	73,23	1,99	5,97
	2018	18,3	91,34	73,76	1,49	10,83
	2019	17,39	83,20	74,44	1,8	13,49
	2020	18,01	97,64	74,46	3,71	-3,45
	2021	18,38	99,09	74,71	3,69	4,37

Kabupaten/Kota	Tahun	Kemiskinan	Capaian Dana Keistimewaan	IPM	TPT	Pertumbuhan PDRB
	2022	16,39	94,86	75,46	2,8	6,58
	2023	15,64	98,01	75,82	2,4	5,65
Kabupaten Gunungkidul	2014	20,83	38,37	67,03	1,61	4,54
	2015	19,34	87,22	67,41	2,9	4,81
	2016	19,34	92,83	67,82	2,9	4,89
	2017	18,65	92,08	68,73	1,65	5
	2018	17,12	81,23	69,24	2,07	5,16
	2019	16,61	96,13	69,96	1,92	5,34
	2020	17,07	97,35	69,98	2,16	-0,68
	2021	17,69	93,25	70,16	2,2	5,31
	2022	15,86	98,10	70,96	2,08	5,37
	2023	15,6	96,83	71,46	2,09	5,04
Kabupaten Sleman	2014	9,5	34,53	80,73	4,21	5,3
	2015	8,21	87,56	81,2	5,37	5,18
	2016	8,21	94,29	82,15	5,37	5,22
	2017	8,13	95,10	82,85	3,51	5,34
	2018	7,65	80,75	83,42	4,4	6,42
	2019	7,41	79,56	83,85	3,93	6,48
	2020	8,12	98,59	83,84	5,09	-3,91
	2021	8,64	98,16	87,18	5,17	5,61
	2022	7,74	95,17	87,69	4,78	5,15
	2023	7,52	98,29	88,61	4,47	5,09

Sumber : BPS dan Paniradya Kaistimewan

Lampiran 4 Hasil Uji Regresi Data Panel

Dependent Variable: KEMISKINAN

Method: Panel Least Squares

Date: 08/18/24 Time: 19:59

Sample: 2014 2023

Periods included: 10

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	49.03347	6.687882	7.331689	0.0000
CAPAIAN_DAIS	-0.007531	0.008288	-0.908689	0.3688
IPM	-0.458706	0.089603	-5.119290	0.0000
TPT	0.202353	0.178038	1.136570	0.2623
PERTUMBUHAN_ PDRB	-0.008957	0.053869	-0.166278	0.8688

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.827966	R-squared	0.970765
Mean dependent var	13.10780	Adjusted R-squared	0.965061
S.D. dependent var	4.891587	S.E. of regression	0.914335
Akaike info criterion	2.820310	Sum squared resid	34.27635
Schwarz criterion	3.164474	Log likelihood	-61.50774
Hannan-Quinn criter.	2.951369	F-statistic	170.1803
Durbin-Watson stat	0.833117	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 5 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Logaritma

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/26/24 Time: 10:07
 Sample: 2014 2023
 Periods included: 10
 Cross-sections included: 5
 Total panel (balanced) observations: 50
 Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	13.85748	2.040755	6.790367	0.0000
LOG(CAPAIAN_D AIS)	-0.052816	0.026955	-1.959398	0.0569
LOG(IPM)	-2.563768	0.482065	-5.318308	0.0000
TPT	0.014048	0.010460	1.343021	0.1867
PERTUMBUHAN_ PDRB	-0.000722	0.003436	-0.210182	0.8346

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.050163	R-squared	0.984008
Mean dependent var	2.498090	Adjusted R-squared	0.980888
S.D. dependent var	0.400703	S.E. of regression	0.055396
Akaike info criterion	-2.787075	Sum squared resid	0.125817
Schwarz criterion	-2.442911	Log likelihood	78.67687
Hannan-Quinn criter.	-2.656015	F-statistic	315.3518
Durbin-Watson stat	1.360789	Prob(F-statistic)	0.000000

Lampiran 6 Hasil Uji Regresi Data Panel dengan Adaptive Model

Dependent Variable: LOG(KEMISKINAN)

Method: Panel Least Squares

Date: 09/26/24 Time: 10:09

Sample (adjusted): 2015 2023

Periods included: 9

Cross-sections included: 5

Total panel (balanced) observations: 45

Cross-section weights (PCSE) standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	14.11974	2.012631	7.015565	0.0000
LOG(CAPAIAN_DAIS (-1))	0.008949	0.022451	0.398605	0.6925
LOG(IPM(-1))	-2.665950	0.474058	-5.623675	0.0000
TPT(-1)	-0.006427	0.008926	-0.720083	0.4761
PERTUMBUHAN_PD RB(-1)	-0.008210	0.003061	-2.682302	0.0110
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
Root MSE	0.042702	R-squared	0.988342	
Mean dependent var	2.481422	Adjusted R-squared	0.985751	
S.D. dependent var	0.399955	S.E. of regression	0.047742	
Akaike info criterion	-3.069157	Sum squared resid	0.082054	
Schwarz criterion	-2.707825	Log likelihood	78.05604	
Hannan-Quinn criter.	-2.934456	F-statistic	381.4974	
Durbin-Watson stat	1.128449	Prob(F-statistic)	0.000000	

